

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 - 2025

Pekerjaan
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Kerjasama



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BERAU
Jl. Dr.Murjani I Telp. 0811590119
Tanjung Redeb, 77311

Dengan



UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Gedung C14, Jl. Tanah Grogot, Gunung Kelua, Samarinda, 75123
Email : uls.ppid.unmul@gmail.com (08125538030)

2022

KATA PENGANTAR

Kabupaten Berau merupakan satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan perkembangan cukup baik dalam kegiatan pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, masih banyak persoalan yang dihadapi dan harus ditanggulangi untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Berau dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Peran penting penanaman modal salah satunya adalah untuk mempercepat perekonomian dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang didukung oleh iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, berkeadilan dan efisien.

Penanaman modal merupakan bagian dari perekonomian nasional dan daerah serta ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, untuk itu maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau melakukan Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Berau Tahun 2023-2025 yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Samarinda. Atas kepercayaan yang diberikan disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan apresiasi juga disampaikan pada semua pihak yang berkontribusi sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan

Harapan kami semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam investasi di Kabupaten Berau.

Samarinda, Oktober 2022
Kepala ULS-PPID
Universitas Mulawarman

Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum.....	I - 4
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 8
1.4. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 9
1.4.1. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial ...	I - 9
1.4.2. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Sistem Perencanaan Pembangunan.....	I - 10
1.5. Sistematika Penulisan	I - 11
BAB II ASAS DAN TUJUAN.....	II - 1
2.1. Asas.....	II - 1
2.2. Tujuan.....	II - 6
BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.	III - 1
3.1. Visi dan Misi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia	III - 1
3.2. Visi dan Misi Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	III - 1
3.3. Visi dan Misi Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026	III - 3
3.4. Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Berau.....	III - 8
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH SERTA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH.....	IV - 1
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Berau.....	IV - 1
4.1.1. Luas dan Batas Wilayah.....	IV - 1
4.1.2. Pemerintahan	IV - 1
4.1.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	IV - 2
4.2. Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Berau	IV - 4

4.2.1. Realisasi Invetasi PMA dan PMDN	IV - 4
4.2.2. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Berau	IV - 6
4.2.3. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Berau	IV - 8
4.3. Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Berau.....	IV - 10
4.3.1. Potensi dan Peluang Investasi di Sektor Pertanian	IV - 10
4.3.2. Potensi dan Peluang Investasi di Industri Pengolahan (Industri Sedang dan Besar)	IV - 18
4.3.3. Potensi dan Peluang Investasi di Pembangunan Pembangkit Listrik.....	IV - 19
4.3.4. Potensi dan Peluang Investasi di Pertambangan dan Penggalan.....	IV - 22
4.3.5. Potensi dan Peluang Investasi di Sektor Pariwisata	IV - 23
4.3.6. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.....	IV - 30

BAB V ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BERAU.....	V - 1
5.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal	V - 2
5.2. Persebaran Penanaman Modal	V - 2
5.3. Fokus Penanaman Modal	V - 3
5.3.1. Pertanian	V - 3
5.3.2. Pertambangan dan Energi.....	V - 7
5.3.3. Infrastruktur.....	V - 9
5.3.4. Industri Pengolahan.....	V - 11
5.3.5. Pariwisata	V - 11
5.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)	V - 12
5.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.....	V - 14
5.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal	V - 14
5.7. Promosi Penanaman Modal.....	V - 16

BAB VI INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG.....	
6.1. Analisis SWOT	VI - 1
6.1.1. Analisis (<i>Internal Factors Analysis Summary</i> (IFAS) dan <i>Eksternal Faktors Analysis Summary</i> (EFAS)	VI - 1
6.2. Strategi Penanaman Modal.....	VI - 30
BAB VII PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI	VII - 1
7.1. Jangka Pendek : Penanaman Modal yang Cepat Menghasilkan	VII - 1
7.2. Jangka Menengah Prioritas Penanaman Modal	VII - 3
BAB VIII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL	VIII - 1
8.1. Kontribusi Manfaat Ekonomi	VIII - 1
8.2. Kontribusi Manfaat Sosial.....	VIII - 2
8.3. Kontribusi Manfaat Lingkungan.....	VIII - 3
BAB IX PELAKSANAAN	IX - 1
BAB X RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT TUMBUH	X-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Kampung/Kelurahan Kabupaten Berau Dirinci menurut Kecamatan Tahun	IV - 2
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Berau Tahun 2018 - 2021	IV - 3
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Berau (Orang) Tahun 2019 - 2021	IV - 4
Tabel 4.4. Realisasi Investasi PMA (US \$), 2019 - 2021	IV - 4
Tabel 4.5. Realisasi Modal Investasi PMDN (Juta Rupiah), 2019 - 2021	IV - 5
Tabel 4.6. Realisasi Investasi PMA (US\$) Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Berau Tahun 2021.....	IV - 7
Tabel 4.7. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Berau.....	IV - 9
Tabel 4.8. Luas Panen Padi di Kabupaten Berau (ha), 2018 - 2021 .	IV - 10
Tabel 4.9. Produksi Padi dan Beras di Kabupaten Berau (ton), 2018-2021.....	IV - 11
Tabel 4.10. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (ha), 2017-2021	IV - 11
Tabel 4.11. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (kw), 2017-2021	IV - 12
Tabel 4.12. Produksi Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (kw), 2017-2021.....	IV - 13
Tabel 4.13. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (ha), 2018 – 2021	IV - 15
Tabel 4.14. Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (ton), 2021	IV - 15
Tabel 4.15. Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Berau Menurut Kecamatan (ekor), 2020.....	IV - 17
Tabel 4.16. Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Berau Menurut Kecamatan (ekor), 2020	IV - 17

Tabel 4.17. Potensi dan Produksi Perikanan Kabupaten Berau	IV - 18
Tabel 4.18. Potensi Industri Besar dan Menengah di Kabupaten Berau	IV - 19
Tabel 4.19. Potensi Kawasan Energi di Kabupaten Berau	IV - 21
Tabel 4.20. Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Berau Tahun 2017 - 2020.....	IV - 22
Tabel 4.21. Potensi Kawasan Pertambangan di Kabupaten Berau	IV - 23
Tabel 4.22. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Berau	IV - 24
Tabel 4.23. Beberapa Potensi dan Daya Tarik Obyek Wisata Kabupaten Berau.....	IV - 26
Tabel 4.24. Jumlah Rumah Makan/ Restoran Se Kabupaten Berau, Tahun 2017 - 2021	IV - 29
Tabel 4.25. Jumlah UMKM Menurut Kecamatan dan Jenis UMKM di Kabupaten Berau, 2020.....	IV - 30
Tabel 4.26. Data Perkembangan Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Berau, Tahun 2017 - 2021	IV - 31
Tabel 4.27. Data Perkembangan UMK Per Kecamatan di Kabupaten Berau, Tahun 2017 – 2021.....	IV - 32
Tabel 6.1. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Pertanian & Perkebunan Kabupaten Berau	VI - 1
Tabel 6.2. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Pertanian & Perkebunan Kabupaten Berau	VI - 2
Tabel 6.3. Analisis Strategi SWOT Sektor Pertanian & Perkebunan Di Kabupaten Berau	VI - 3
Tabel 6.4. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Pertanian & Perkebunan Di Kabupaten Berau.....	VI - 4
Tabel 6.5. Matriks Internal-Eksternal Sektor Pertanian & Perkebunan Di Kabupaten Berau.....	VI - 5
Tabel 6.6. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Peternakan Kabupaten Berau.....	VI - 6
Tabel 6.7. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Peternakan Kabupaten Berau	VI - 6
Tabel 6.8. Analisis Strategi SWOT Sektor Peternakan Kabupaten Berau	VI - 7
Tabel 6.9. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Peternakan Di Kabupaten Berau.....	VI - 8
Tabel 6.10. Matriks Internal-Eksternal Sektor Peternakan Di Kabupaten Berau.....	VI - 8

Tabel 6.11. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Perikanan Kabupaten Berau	VI - 9
Tabel 6.12. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Perikanan Kabupaten Berau	VI - 10
Tabel 6.13. Analisis Strategi SWOT Sektor Perikanan Kabupaten Berau	VI - 11
Tabel 6.14. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Perikanan Di Kabupaten Berau	VI - 12
Tabel 6.15. Matriks Internal - Eksternal Sektor Perikanan Di Kabupaten Berau	VI - 13
Tabel 6.16. Faktor - Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Kehutanan Kabupaten Berau	VI - 14
Tabel 6.17. Faktor - Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Kehutanan Kabupaten Berau	VI - 15
Tabel 6.18. Tabel Analisis Strategi SWOT Sektor Kehutanan Kabupaten Berau	VI - 16
Tabel 6.19. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Kehutanan Di Kabupaten Berau	VI - 16
Tabel 6.20. Matriks Internal-Eksternal Sektor Kehutanan Di Kabupaten Berau	VI - 17
Tabel 6.21. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Pertambangan Kabupaten Berau	VI - 18
Tabel 6.22. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Pertambangan Kabupaten Berau	VI - 19
Tabel 6.23. Analisis Strategi SWOT Sektor Pertambangan Kabupaten Berau	VI - 20
Tabel 6.24. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Pertambangan Di Kabupaten Berau	VI - 20
Tabel 6.25. Matriks Internal-Eksternal Sektor Pertambangan Di Kabupaten Berau	VI - 21
Tabel 6.26. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor UMKM & Koperasi Di Kabupaten Berau	VI - 22
Tabel 6.27. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor UMKM dan Koperasi Kabupaten Berau	VI - 23
Tabel 6.28. Analisis Strategi SWOT Sektor UMKM & Koperasi di Kabupaten Berau	VI - 24
Tabel 6.29. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor UMKM & Koperasi Di Kabupaten Berau	VI - 24
Tabel 6.30. Tabel Matriks Internal-Eksternal Sektor UMKM & Koperasi Di Kabupaten Berau	VI - 25

Tabel 6.31. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Pariwisata Kabupaten Berau	VI - 26
Tabel 6.32. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Pariwisata Kabupaten Berau	VI - 27
Tabel 6.33. Analisis Strategi SWOT Sektor Pariwisata Kabupaten Berau	VI - 28
Tabel 6.34. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Pariwisata Di Kabupaten Berau.....	VI - 28
Tabel 6.35. Tabel Matriks Internal-Eksternal Sektor Pariwisata Di Kabupaten Berau	VI - 29
Tabel 6.36. Pembobotan Berdasarkan Skala Prioritas	VI - 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial Provinsi Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten.....	I - 9
Gambar 1.2. Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten.....	I - 10
Gambar 4.1. Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Berau, 2016 - 2020.....	IV - 33
Gambar 6.1. Diagram analisis SWOT Sektor Pertanian & Perkebunan Kabupaten Berau	VI - 5
Gambar 6.2. Diagram analisis SWOT Sektor Peternakan Di Kabupaten Berau.....	VI - 9
Gambar 6.3. Diagram analisis SWOT Sektor Perikanan Di Kabupaten Berau.....	VI - 13
Gambar 6.4. Diagram analisis SWOT Sektor Kehutanan Di Kabupaten Berau.....	VI - 17
Gambar 6.5. Diagram analisis SWOT Sektor Pertambangan Di Kabupaten Berau.....	VI - 21
Gambar 6.6. Diagram analisis SWOT Sektor UMKM & Koperasi Di Kabupaten Berau.....	VI - 25
Gambar 6.7. Diagram Analisis SWOT Sektor Pariwisata Di Kabupaten Berau.....	VI - 29
Gambar 6.8. Diagram Analisis SWOT	VI - 31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Berau merupakan satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang pada tahun 2020 berpenduduk 252.648 jiwa, luas wilayah 36.962,38 km² serta secara administratif terdiri dari 13 kecamatan dan 110 kelurahan/kampung.

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan yang cukup baik, paling tidak jika dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mencapai 5,36 % yang berarti tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Paser yang mempunyai pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama sedikit lebih tinggi yaitu 5,41%. Namun demikian, masih banyak persoalan yang dihadapi dan harus ditanggulangi diantaranya masih tingginya pengangguran terbuka yaitu sebanyak 6.557 orang atau 2,60 % dan kemiskinan sebanyak 13.620 atau 5,38 % dari jumlah penduduk Kabupaten Berau tahun 2021.

Mendorong peningkatan penanaman modal (investasi) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan penerimaan tenaga kerja /menurunkan pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Berau. Hal ini disebabkan penanaman modal merupakan mesin pertumbuhan (*growth engine*) yang akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada dua sisi sekaligus yaitu dari sisi pasokan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*). Pada sisi pasokan, penanaman modal akan memperbesar kapasitas produksi berupa penambahan terhadap penawaran barang maupun jasa. Sedang pada sisi permintaan, penanaman modal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan/proses penyediaan barang dan jasa karena adanya penanaman modal. Peningkatan pendapatan akan berpengaruh terhadap peningkatan agregat (*aggregate demand*), yang selanjutnya akan memberikan dampak terhadap kenaikan

produksi daerah/negara yang tergambar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peran penting penanaman modal salah satunya adalah untuk mempercepat perekonomian dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang didukung oleh iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, berkeadilan dan efisien.

Dalam konteks negara, penanaman modal merupakan bagian dari perekonomian nasional dan daerah serta ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Sedang bagi perusahaan, penanaman modal ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedang modal dalam pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan RUPM melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RUPM serta sebagai upaya untuk mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM, Pemerintah mengatur perlunya (mewajibkan) Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyusunan RUPM Kabupaten Berau Tahun 2023 – 2025 ini berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Selain itu dalam penyusunannya juga memperhatikan dan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya

baik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau. Untuk Kabupaten Berau penyusunan RUPM ini menyelaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan sektoral seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2036, Kajian Lingkungan Hidup Daerah dan lain-lain.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RUPM Kabupaten Berau Tahun 2023 - 2025 ini adalah:

1. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
25. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
 27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 577);
 28. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016–2036, (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2023, (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);
 34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 31);
 35. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 63);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 3);
 37. Peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 – 2036;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan ini adalah dihasilkannya dokumen RUPM yang menjadi acuan/pedoman bagi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Berau sehingga terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal di Kabupaten Berau.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui kondisi umum, potensi dan perkembangan penanaman modal di Kabupaten Berau;
- 2) Menentukan Visi dan Misi RUPM Kabupaten Berau;

- 3) Mengetahui arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Berau;
- 4) Memetakan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam pembangunan dibidang penanaman modal di Kabupaten Berau;
- 5) Memberikan usulan kebijakan dan strategi yang sebaiknya diambil dalam pembangunan dibidang penanaman modal di Kabupaten Berau; dan
- 6) Menjelaskan kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan penanaman modal di Kabupaten Berau.

1.4. Keterkaitan Dokumen RPUM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4.1. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial

RUPM Kabupaten Berau Tahun 2023-2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan spasial RTRW Kabupaten Berau. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara struktur ruang, pola ruang, dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, baik pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi maupun Nasional

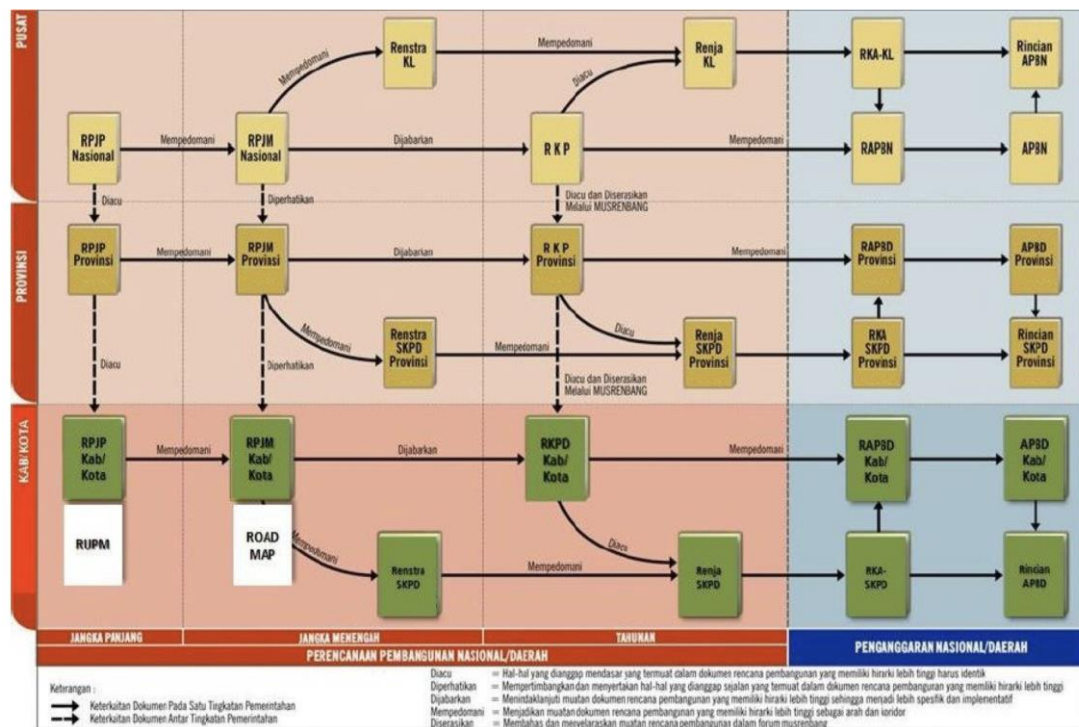


Gambar 1.1. Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial Dan Nonspasial Provinsi Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat Dan Kabupaten

Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial Provinsi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang sifatnya mensinergikan dokumen perencanaan lainnya.

1.4.2. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

RUPM Kabupaten Berau disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nonspasial seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Berau. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah pemerintah Kabupaten Berau.



Gambar 1.2. Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM Kabupaten Berau merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan dokumen RUPM Kabupaten Berau Tahun 2023 – 2025 ini sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	ASAS DAN TUJUAN
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH SERTA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
BAB VI	INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG
BAB VII	PETA PANDUAN IMPLEMENTASI
BAB VIII	KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL
BAB IX	PENUTUP

BAB II ASAS DAN TUJUAN

2.1. Asas

Naskah RUPM disusun berdasarkan asas sebagaimana yang diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pemerintah. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa kebijakan penanaman modal di Indonesia harus berasaskan:

- a) **Kepastian Hukum.** Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia mesti memiliki asas legalitas berdasarkan peraturan atau Undang-undang yang jelas dan pasti. Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Setiap tindakan atau kegiatan penanaman modal harus ada aturan hukum positif yang melandasinya. Tentu saja hukum positif yang menjadi landasan tindakan atau perbuatan tersebut harus baik dan adil untuk kepentingan daerah, masyarakat dan penanam modal terakomodasi secara pasti dalam peraturan daerah dan dijamin dilaksanakan dengan baik.
- b) **Keterbukaan.** Asas ini bermakna bahwa penanaman modal yang dilakukan harus terbuka. Dalam makna penanaman modal harus transparan dan diketahui oleh masyarakat luas/umum tentang segala aspeknya. Sehingga dengan asas ini, masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu tentang penanaman modal terkait dan dapat melakukan kontrol secara proporsional. Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal di Kabupaten Berau. Pemerintah perlu membuka berbagai informasi terkait dengan kegiatan penanam modal kepada masyarakat Kabupaten Berau dan penanam modal atau calon penanam modal, sehingga semua pihak memiliki ruang untuk mengkritisnya dan memberikan rekomendasinya kepada

pemerintah daerah agar kegiatan penanam modal tidak salah dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Berau. Penyelenggara kegiatan penanaman modal berkewajiban membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

c) **Akuntabilitas.** Asas ini mengandung makna bahwa:

- 1) Penanaman modal yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) secara hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal yang dilakukan harus mampu memberikan jawaban-jawaban logis (*answerability*) atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aspek-aspeknya, baik pertanyaan yang sifatnya filosofi maupun teknis.
- 3) Penanaman modal yang dilakukan harus dapat dianggap bersalah (*blameworthiness*) dan diajukan ke pengadilan atas tindakan-tindakan salah secara sengaja oleh pelaku penanaman modal. Pelaku penanaman modal tidak memiliki hak imunitas di hadapan hukum
- 4) Penanaman modal yang dilakukan memiliki batasan-batasan atau ketidakbebasan (*liability*). Penanaman modal yang dilakukan tidak boleh menjadi dasar pembenaran terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap batasan-batasan moral, estetika, dan religius yang dianut oleh masyarakat.

d) **Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.** Asas ini bermakna bahwa setiap penanam modal atau calon penanam modal akan memperoleh perlakuan yang sama tanpa menjadikan asal-usul

kenegaraan sebagai alasan bagi perlakuan yang diskriminatif. Pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

- e) **Kebersamaan.** Asas kebersamaan dalam konteks penanaman modal bermakna bahwa penanaman modal harus dilakukan dalam satu visi yang sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, yakni dalam rangka mencapai visi pembangunan, yaitu tercapainya kemakmuran secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Kemudian, kebersamaan juga bermakna bahwa penanaman modal harus mendatangkan manfaat bagi semua. Bukan dilandasi oleh egoisme yang hanya menonjolkan egoisme segelintir orang. Disaat kebersamaan mengabaikan hak-hak masyarakat secara luas. Selanjutnya, kebersamaan juga bermakna kerendah-hatian, kerelaan berkorban, dan lain sebagainya. Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
- f) **Efisien.** Dengan asas ini, maka bermakna bahwa, penanaman harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi terhadap perbandingan antara besaran seluruh *in put* (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal, teknologi, dan lain sebagainya) yang digunakan dengan *out put* dan *out come* yang dihasilkan. Asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Asas efisiensi dalam arti dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya oleh penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal oleh pemerintah daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- g) **Berkeadilan.** Asas ini dalam konteks penanaman modal bermakna bahwa penanaman modal harus dilakukan secara adil. Yakni bahwa penanaman modal dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa ada perlakuan diskriminatif. Kemudian, penanaman modal terhadap sektor/subsektor ekonomi tertentu harus seminimal mungkin menimbulkan disrupsi atau eksternalitas negatif terhadap sektor ekonomi yang lain. Disamping itu, penanaman modal harus mempertimbangkan kesetaraan dalam persaingan usaha. Sehingga penanaman modal yang besar, tidak memaksa penanaman modal dengan skala yang lebih kecil.
- h) **Berkelanjutan.** Hal ini bermakna bahwa penanaman modal yang dilakukan berkomitmen terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia saat ini tanpa mengabaikan terpenuhinya kebutuhan generasi-generasi yang akan datang. Atau dalam kalimat yang lain, penanaman modal harus dinikmati dampak-dampak positif dari waktu ke waktu. Bukan pada satu waktu tertentu saja. Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- i) **Berwawasan Lingkungan.** Berdasarkan asas ini, maka penanaman modal harus memiliki tujuan-tujuan yang bersifat sosial-ekonomi sekaligus bertujuan yang bersifat ekologis. Yakni, penanaman modal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produksi daerah serta variabel-variabel makro ekonomi lainnya dan perbaikan taraf hidup sosial masyarakat harus secara simultan dilakukan untuk mencapai ekologi yang tetap lestari. Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kegiatan penanaman modal adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 Angka (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup).

- j) **Kemandirian.** Asas penanaman modal ini mengandung makna bahwa penanaman modal yang dilakukan semampu mungkin dilakukan dengan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki sendiri oleh pemerintah Kabupaten Berau. Dan ditujukan untuk menciptakan kemandirian Kabupaten Berau dalam memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Dan selain itu, penanaman modal dengan kinerja yang prima akan menciptakan Kabupaten Berau secara relatif mencapai kemandirian fiskal dalam rangka pembangunan daerah. Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- k) **Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional.** Asas ini bermakna bahwa penanaman modal dilakukan dalam rangka menghilangkan kesenjangan (disparitas/gap) kemakmuran antar daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tingkat kemakmuran masyarakat yang merata, maka soliditas antar rakyat semakin kukuh. Dan pada akhirnya akan meniadakan bibit disintegrasi bangsa. Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Berau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan merupakan satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional.
- l) **Asas keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan privat (individual)** Asas yang memadukan antara kepentingan umum dan kepentingan privat agar tidak saling bertentangan dalam kegiatan penanaman modal. Tidak boleh kegiatan penanaman modal. merugikan kepentingan masyarakat (umum) dan hanya menguntungkan penanam modal.

2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RUPM ini adalah sebagai acuan pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Keberadaan RUPM Kabupaten Berau dimaksudkan untuk memberikan panduan/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Selain itu untuk menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam hal ini investor dan pihak terkait lain dalam melakukan penanaman modal di Kabupaten Berau.

Adapun implementasi RUPM Kabupaten Berau diharapkan dapat :

- 1) **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (nasional).** Hal ini bermakna bahwa penanaman modal ditujukan untuk meningkatkan produksi atau pendapatan daerah (PDRB). Dengan PDRB yang selalu meningkat, diharapkan tingkat pengangguran mengalami penurunan, tingkat harga-harga akan stabil, neraca perdagangan berkembang secara positif, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) bagi seluruh masyarakat.
- 2) **Menciptakan peluang kerja.** Artinya penanaman modal di Kabupaten Berau, dimaksudkan untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau.
- 3) **Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.** Penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Berau adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sekarang dan dalam rangka mempersiapkan pemenuhan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang.

- 4) **Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah.** Penanaman modal yang dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Berau adalah ditujukan untuk meningkatkan daya saing usaha dan produk atau komoditas yang dihasilkan di Kabupaten Berau baik di pasar regional, nasional, maupun internasional.
- 5) **Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah.** Teknologi merupakan unsur yang berperan signifikan dalam menentukan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas teknologi harus senantiasa ditingkatkan disamping peningkatan kapasitas sumber-sumber daya ekonomi lainnya, seperti sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan kapital.
- 6) **Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.** Penanaman modal ditujukan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan layak diarus-utamakan (mainstreaming) mengingat bahwa ekonomi kerakyatan merupakan piranti ekonomi yang dapat diberdayakan untuk mengakselerasi pemerataan pendapatan antar penduduk. Dan pada akhirnya akan menghilangkan atau meminimalisasi *income disparity* antar penduduk.
- 7) **Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan mempergunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.** Penanaman modal di Kabupaten Berau dilaksanakan dalam rangka mengubah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Sehingga dengannya, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kapital, teknologi, ilmu pengetahuan, dan skill yang dimiliki oleh Kabupaten Berau menjadi berdaya guna secara nyata dan signifikan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
- 8) **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.** Tujuan akhir dari berbagai kegiatan pembangunan, termasuk penanaman modal adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Hal ini bermakna bahwa penanaman modal adalah dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat (*an sich*). Bukan untuk tujuan-tujuan yang lain, seperti *prestige*, egoisme kedaerahan, dan lain sebagainya.

BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

3.1. Visi dan Misi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia

Visi penanaman modal Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2025 yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum penanaman Modal adalah **“Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”**. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, sebagai berikut:

- 1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
- 2) Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah.
- 3) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

3.2. Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur

Visi penanaman modal Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2025 adalah **“Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain :

- 1) Iklim investasi yang berdaya saing bahwa peningkatan iklim investasi harus diarahkan ke kegiatan yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
- 2) Agroindustri dan energi ramah lingkungan merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Misi penanaman modal Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan dan pemerataan penanaman modal secara sektoral dalam wilayah pengembangan dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian daerah.

- 2) Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal dengan mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan antar sektor dan wilayah.
- 3) Meningkatkan konektivitas pelayanan penanaman modal melalui kualitas dan kuantitas aparatur serta dengan dukungan sarana prasarana yang memadai.

Mengacu pada visi misi penanaman modal di Kalimantan Timur, Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan perijinan dan penanaman modal menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kalimantan Timur melalui suatu visi dan misi. Visi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ialah: **"Menjadi Institusi yang Handal dan Profesional untuk Menarik dan Memfasilitasi Investor Menuju Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera".**

Terdapat lima kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu:

- 1) Institusi yang handal, yaitu DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan pelayanan prima dalam hal penanaman modal.
- 2) Profesional, yaitu aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur bisa menunjukkan kinerja sesuai harapan masyarakat serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Memfasilitasi, yaitu DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan instansi lain agar para investor tertarik untuk melakukan investasi di Kalimantan Timur.
- 4) Investor, adalah penanam modal pada sektor swasta yang berfasilitas dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 5) Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera, adalah suatu tatanan kehidupan masyarakat yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, kecukupan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap anggota masyarakat Kalimantan Timur dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para *stakeholder*, maka yang ditetapkan sebagai Misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah;
- 3) Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran;
- 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA;
- 5) Mewujudkan kualitas aparatur yang handal didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sangat berkaitan dengan 3 (Tiga) dari sepuluh program prioritas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Mengatasi keterbatasan akses permodalan.
- 2) Peningkatan pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan penanaman modal.
- 3) Iklim investasi.

3.3. Visi dan Misi Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 bahwa visi pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 adalah:

“Mewujudkan Berau maju dan sejahtera sebagai pusat penanaman modal serta peningkatan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan”.

Makna yang terkandung pada visi tersebut adalah membulatkan tekad Kabupaten Berau akan menjadi tempat yang tepat dan menguntungkan bagi

investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya.

Terdapat tiga kata kunci yang terkandung didalamnya yaitu:

- 1) Maju dan sejahtera sebagai pusat penanaman modal, dimaknai sebagai harapan, keinginan, atau hasrat para penanaman modal asing maupun dalam negeri sebagai pusat yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Berau, mengingat kondisi, potensi, serta kemungkinan pengembangan penanaman modalnya akan sangat menguntungkan dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh optimalisasi pelayanan perijinan yang semakin paripurna, inovatif, efektif, dan efisien, serta ketersediaan data dan informasi ekonomi lokal dan regional yang akurat, tepat dan mutakhir.
- 2) Peningkatan sumber daya manusia yang dapat diartikan dengan meningkatnya sumber daya manusia di Kabupaten Berau yang memiliki kemampuan, keterampilan dan sikap akan berdampak pada kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan.
- 3) Meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, berarti meningkatnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang diarahkan, akan memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang, tanpa mengorbankan generasi mendatang. Penggunaan teknologi maju yang sesuai dengan daya dukung sumber daya manusia yang memadai berakibat tidak ada degradasi lingkungan. Hal ini secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima oleh masyarakat di Kabupaten Berau.

Maksud dari visi di atas menjadi harapan, bahwa Kabupaten Berau selama beberapa tahun ke depan akan berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk menciptakan daya tarik bagi investasi dunia yang sehat, berdampak positif bagi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Berau.

Sedangkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut:

- 1) **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Berau. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan adalah dengan menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Progamme*).

Untuk melaksanakan misi ini, maka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Dalam bidang pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan penyelenggaraan

pelayanan pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya pendidikan formal, namun pendidikan non formal pun akan ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur.

Dalam bidang kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan juga ikut meningkat.

2) Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka

lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka transformasi ekonomi dari mengandalkan pembangunan ekonomi pada sumber daya tidak terbarukan (unrenewable resources), khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian secara perlahan dan pasti mulai bergeser ke pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan (renewable resources), khususnya yang menjadi sektor andalan di Kabupaten Berau seperti sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata.

3) Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur diakui sebagai salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi memungkinkan mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien ke dan dari Kab. Berau. Di samping itu, telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi.

Pentingnya sarana dan prasarana publik, khususnya telekomunikasi dan jaringan digital akan semakin penting di era digital sekarang ini. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa saat ini dan terlebih lagi di masa mendatang, ekonomi digital dipastikan akan menjadi suatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Era ekonomi digital telah menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Daerah yang tidak bisa memanfaatkan peluang dan sekaligus dipastikan tidak akan mampu bersaing dan akhirnya akan tertinggal dengan daerah lain di masa depan. Bank Indonesia (BI) bahkan meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan ditopang oleh ekonomi digital. Terlebih digitalisasi sudah menjalar hampir ke semua jenis usaha.

- 4) **Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.** Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

3.4. Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Berau

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Berau khususnya pada misi keempat yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau sebagai salah satu OPD di Kabupaten Berau mengusung visi :

“Terwujudnya pelayanan satu pintu yang prima dalam menunjang tumbuhnya investasi di Kabupaten Berau”.

Sejalan dengan visi diatas, DPMPTSP memiliki misi antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan publik yang mudah dan transparan;
- 2) Mendorong terwujudnya Kabupaten Berau sebagai daerah investasi yang menarik dan berdaya saing;

- 3) Meningkatkan kualitas SDM dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas;
- 4) Menyiapkan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang representatif.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dan dengan memerhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para *stakeholder*, maka yang ditetapkan sebagai misi RUPM Kabupaten Berau Tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) Mewujudkan penanaman modal berbasis sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.
- 3) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas, yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan misi di atas, makna yang terkandung dalam masing-masing misi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas

Memiliki makna pelayanan penanaman modal yang cepat dalam waktu penyelesaian pelayanan, efisien dalam pelaksanaan dan sumber daya, tanggap, berintegritas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam mewujudkan misi ini, sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kesejahteraan serta karier aparatur. Disamping itu juga diperlukan dukungan sarana dan

prasarana pelayanan yang telah mengaplikasikan informasi dan teknologi terkini.

- 2) Mewujudkan penanaman modal berbasis sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur

Penanaman Modal menjadi salah satu poin penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbasis sumber daya manusia diyakini dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah, dan memicu kegiatan produksi. Sumber daya manusia yang baik, cerdas, sejahtera dan berbudi luhur secara kuantitas dan kualitas merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di suatu daerah.

- 3) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sumber daya alam dan pertanian yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Meningkatnya taraf ekonomi menjadi hal penting bagi seluruh kalangan masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Optimalisasi sumber daya alam dan pertanian harus dilakukan melalui pemerataan dalam melakukan investasi berdasarkan potensi dan keunggulan pada sektor agroindustry. Hal ini dapat dilakukan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Dengan meningkatnya sarana dan prasarana publik maka akan berdampak pada percepatan proses pelaksanaan perencanaan investasi penanaman modal. Hal ini mengakibatkan investor mampu menghemat waktu, meningkatkan produktivitas yang berwawasan lingkungan sehingga pembangunan akan terus berkelanjutan karena mengoptimalkan manfaat sumber daya alam tanpa harus merusaknya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH SERTA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Berau

4.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Kabupaten terletak di Tanjung Redeb, saat ini Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 36.962,38. km².

Batas wilayah Kabupaten Berau sebagai berikut: 1). Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Berau, 2). Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar, 3). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, 4). Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Malinau dan Kutai Barat.

4.1.2. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan dan 110 kampung/kelurahan. Tiga Belas kecamatan di Kabupaten Berau yaitu 1) Kelay, 2) Talisayan, 3) Tabalar, 4) Biduk-biduk, 5) Pulau Derawan, 6) Maratua, 7) Sambaliung, 8) Tanjung Redeb, 9) Gunung Tabur, 10) Segah, 11) Teluk Bayur, 12) Batu Putih, 13) Biatan. Didasarkan pada luas wilayah, maka kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kelay, yang mempunyai luas wilayah 6.556,54 km² (17,74% dari luas wilayah Kabupaten Berau). Sedangkan kecamatan yang paling sempit di Kabupaten Berau adalah Kecamatan Tanjung Redeb dengan luas wilayah 0,07% dari luas wilayah Kabupaten Berau atau 24,42 km².

Apabila didasarkan pada jumlah kampung/kelurahan maka kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau mempunyai kisaran jumlah desa/kelurahan sangat besar yaitu dari yang paling sedikit sebanyak lima kampung di Kecamatan Pulau Derawan, hingga terbanyak di Kecamatan Kelay dan Sambaliung dengan jumlah sebanyak 14 kampung (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Kampung/Kelurahan Kabupaten Berau Dirinci menurut Kecamatan Tahun 2021

	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase Luas (%)	Jumlah Kampung/Kelurahan
1.	Kelay	6.556,54	17,74	14
2.	Talisayan	1.621,57	4,39	10
3.	Tabalar	1.837,34	4,97	6
4.	Biduk-Biduk	2.429,99	6,57	6
5.	Pulau Derawan	4.423,99	11,97	5
6.	Maratua	5.616,26	15,19	4
7.	Sambaliung	2.163,37	5,85	14
8.	Tanjung Redeb	24,42	0,07	6
9.	Gunung Tabur	1.963,32	5,31	11
10.	Segah	5.241,29	14,18	13
11.	Teluk Bayur	316,98	0,86	6
12.	Batu Putih	3.575,30	9,67	7
13.	Biatan	1.192,03	3,22	8
Jumlah 2021		36.962,38	100,00	110

Sumber : BPS, Kab. Berau, 2022

4.1.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Berau selama empat tahun terakhir (2018 – 2021) terus mengalami peningkatan. Penduduk Kabupaten Berau tahun 2021 sebanyak 252.648 orang bertambah sebanyak 26.139 orang atau meningkat sebesar 11,54% dibanding tahun 2018. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 maka telah terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 60.841 orang yang berarti meningkat sebesar 31,72% dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 2,49%.

Persebaran penduduk Kabupaten Berau pada 13 kecamatan menunjukkan perbedaan persebaran yang sangat besar antar kecamatan. Tanjung Redeb yang merupakan ibukota Kabupaten Berau mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 71.073 orang pada tahun 2021. Hal ini berarti jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Redeb tersebut mencapai 28,13% dari jumlah penduduk Kabupaten Berau. Sebaliknya Kecamatan Kelay hanya mempunyai penduduk sebanyak 9.439 orang atau 3,74% dari jumlah penduduk Kabupaten Berau.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Berau pada empat tahun terakhir (2018 – 2021) terus menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6,13 jiwa/km² menjadi 6,84 jiwa/km², yang berarti kepadatan penduduk pada periode waktu tersebut meningkat 11,58%. Kepadatan penduduk antar kecamatan menunjukkan variasi yang besar. Kecamatan Maratua mempunyai kepadatan penduduk paling rendah yaitu 0,65 jiwa/km² sedang kepadatan penduduk paling besar di Kabupaten Berau terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb yaitu 2.910,44 jiwa/km².

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Berau Tahun 2018-2021

	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1.	Kelay	9.439	3,74	1,44
2.	Talisayan	14.933	5,91	9,21
3.	Tabalar	6.932	2,74	3,77
4.	Biduk-Biduk	6.649	2,63	2,74
5.	Pulau Derawan	11.511	4,56	2,60
6.	Maratua	3.673	1,45	0,65
7.	Sambaliung	37.757	14,94	17,45
8.	Tanjung Redeb	71.073	28,13	2.910,44
9.	Gunung Tabur	25.912	10,26	13,20
10.	Segah	14.917	5,90	2,85
11.	Teluk Bayur	31.938	12,64	100,76
12.	Batu Putih	8.951	3,54	2,50
13.	Biatan	8.963	3,55	7,52
Jumlah 2021		252.648	100,00	6,84
Jumlah 2020		248.040	100,00	6,71
Jumlah 2019		232.287	100,00	6,27
Jumlah 2018		226.509	100,00	6,13

Sumber : BPS Kab. Berau, 2019 - 2022

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Berau dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 171.790 orang, terbagi menjadi 112.606 orang (65,55%) tergolong angkatan kerja dan 59.184 orang (34,45%) bukan angkatan kerja.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Berau (Orang) Tahun 2019-2021

Kegiatan Utama	2019	%	2020	%	2021	%
Angkatan Kerja (AK)	110.963	67,11	113.389	67,40	112.606	65,55
Bekerja	105.321	63,70	107.624	63,97	106.049	61,73
Pengangguran	5.642	3,41	5.765	3,43	6.557	3,82
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	54.384	32,89	54.843	32,60	59.184	34,45
Jumlah (AK+BAK)	165.347	100,00	168.232	100,00	171.790	100,00

Sumber : BPS, Kab. Berau, 2020 - 2022

4.2. Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Berau

4.2.1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Berau pada tahun 2021 sebesar 35.752,70 US\$, yang berarti hanya 4,80 % dari realisasi PMA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun yang sama . Namun demikian investasi PMA Kabupaten Berau dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Menurut Supratman, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Investasi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Berau, ketika ditemui helloborneo.com, bahwa PMA secara keseluruhan didominasi pada tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, perhotelan dan industri makanan (restoran). Di Kabupaten Berau, investor asing ditingkatkan dengan melirik daerah pariwisata. Seperti di Kecamatan Maratua yang banyak didominasi investor asing yang berasal dari Jerman dan Malaysia.

Tabel 4.4. Realisasi Investasi PMA (US \$), 2019-2021

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi PMA		
	2019	2020	2021
Paser	16.060,90	16.069,90	31.190,40
Kutai Barat	67.924,50	37.063,60	29.653,60
Kutai Kartanegara	69.568,70	63.190,10	122.865,60
Kutai Timur	324.294,30	117.645,70	248.360,80
Berau	5.950,90	16.223,30	35.752,70
Penajam Paser Utara	18.765,60	5.870,00	1.602,80

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi PMA		
	2019	2020	2021
Mahakam Ulu	33.524,40	11.453,80	123,90
Balikpapan	24.974,20	36.093,80	193.184,10
Samarinda	21.280,40	18.803,70	17.125,00
Bontang	280.755,50	55.613,30	65.331,30
Kalimantan Timur	863.099,40	378.027,20	745.190,20

Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2020 – 2022 (Data Diolah)

Kabupaten Berau dalam hal investasi PMDN berada pada posisi ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan investasi yang harus mendapat perhatian lebih oleh pemerintah daerah. Merujuk pada uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Berau kurang menarik minat PMDN. Tentu saja ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam mengembangkan potensinya sehingga menjadi kabupaten yang diminati oleh PMDN.

Tabel 4.5. Realisasi Modal Investasi PMDN (Juta Rupiah), 2019-2021

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi PMDN		
	2019	2020	2021
Paser	1.669.261,90	432.992,30	567.121,50
Kutai Barat	2.163.608,80	1.897.214,30	1.437.227,90
Kutai Kartanegara	6.305.287,00	2.284.878,70	3.319.550,00
Kutai Timur	1.852.618,30	1.317.579,20	5.279.054,00
Berau	3.155.176,20	3.615.380,50	445.264,40
Penajam Paser Utara	1.556.938,90	487.048,20	404.886,00
Mahakam Ulu	499.026,10	508.160,00	575.498,90
Balikpapan	2.500.507,10	13.849.409,80	16.773.016,60
Samarinda	2.429.734,10	659.902,80	585.553,30
Bontang	541.894,70	881.443,00	910.229,60
Kalimantan Timur	22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20

Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2020 – 2022 (Data Diolah)

Investasi PMDN di Kabupaten Berau tahun 2021 sebesar Rp. 445, 266 Milyar menurun draktis jika dibanding dengan investasi tahun sebelumnya

yang mencapai Rp. 3, 615 Trilyun. Nilai Investasi PMDN Kabupaten Berau tahun 2020 menempati peringkat ke-2 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur namun pada tahun 2021 nilai investasi di Kabupaten Berau menempati urutan ke- 9 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Menurut Supratman dalam *helloborneo.com*, pencapaian realisasi investasi ini diperoleh berdasarkan perhitungan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online tahun 2021. Total realisasi investasi pada tahun 2021 belum dapat keluar secara kolektif, karena masih sering ditemui beberapa kendala. Kendala tersebut berupa banyaknya perusahaan yang belum memberikan data LKPM secara jujur dan sesuai dengan anjuran DPMPTSP. Angka realisasi dikatakan lesu walaupun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, misalnya terdapat beberapa perusahaan tambang di kabupaten Berau tetapi yang melapor rutin hanya lima perusahaan. Kendala lainnya ialah anggaran yang kurang serta letak geografis Kabupaten Berau yang tidak dapat dijangkau dengan cepat, karena banyak perusahaan berada di perkampungan dan pedalaman. Pemerintah Kabupaten Berau saat ini tengah menggeliat membangun berbagai infrastruktur dan sufrastruktur melalui berbagai sektor pembangunan.

4.2.2. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Berau

Investasi PMA berdasarkan sektor usaha yang ada di Kabupaten Berau terdiri atas 3 sektor antara lain, pertama sektor primer yang terdiri dari (1) tanaman pangan dan perkebunan; (2) peternakan; (3) kehutanan; (4) perikanan; dan (5) pertambangan, kedua sektor sekunder yang terdiri dari (1) industri makanan; (2) industri tekstil; (3) industri barang dari kulit & alas kaki; (4) industri kayu; (5) industri kertas, barang dari kertas dan percetakan; (6) industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi; (7) industri karet dan plastik; (8) industri mineral non logam; (9) elektronik; (10) jam; (11) industri alat angkutan dan alat transportasi lain; dan (12) industry lainnya, dan ketiga sektor tersier yang terdiri dari (1) listrik, gas dan air; (2) konstruksi; (3) perdagangan dan reparasi; (4) hotel dan restoran; (5) transportasi, gudang

dan komunikasi; (6) perumahan, kawasan industri dan perkantoran; dan (7) jasa lainnya. Nilai investasi PMA di Kabupaten Berau tahun 2021 dan Triwulan I tahun 2020 disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Realisasi Investasi PMA ((U\$) Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Berau Tahun 2021

No	Sektor Usaha	Investasi Tahun 2021 Triwulan				Investasi Tahun 2022 Triwulan
		I	II	III	IV	I
I	Sektor Primer					
	1. Tanaman Pangan & Perkebunan	272,500	921,500	522,900	463,300	605,800
	2. Peternakan	-	-	-	-	-
	3. Kehutanan	-	-	-	-	-
	4. Perikanan	-	-	-	-	-
	5. Pertambangan	672,600	288,200	13.432,300	-	995,500
II	Sektor Sekunder					
	2. Industri Makanan	3,700	2,400	50,300	4.224,500	149,400
	3. Industri Tekstil	-	-	-	-	-
	4. Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-
	5. Industri Kayu	-	-	-	-	-
	6. Industri Kertas, Barang dari Kertas & Percetakan	-	-	-	-	-
	7. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	-	-	-	-	-
	8. Industri Karet dan Plastik	-	-	-	-	-
	9. Industri Mineral Non Logam	-	-	-	-	-
	10. Elektronik	-	-	-	-	-
	11. Jam	-	-	-	-	-
	12. Industri Alat Angkutan & Alat Transportasi Lain	-	-	19.048,800	-	-
	13. Industri Lainnya	-	-	-	-	-
III	Sektor Tersier					
	1. Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-
	2. Konstruksi	-	-	-	-	-
	3. Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	-	-
	4. Hotel dan Restoran	-	-	-	-	-
	5. Transportasi, Gudang dan Komunikasi	-	-	-	-	-
	6. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	-	-	-	-	-
	7. Jasa Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: DPMPSTSP Kab. Berau 2022 (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, pada sektor primer, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang sangat besar ialah pada sektor usaha pertambangan dengan nilai investasi pada tahun 2021 sebesar U\$ 14.393,10

dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Realisasi investasi pertambangan ini terbesar pada triwulan ke III yaitu U\$ 13.432,300. Nilai investasi pertambangan cukup tinggi dikarenakan permintaan dunia saat itu akan kebutuhan bahan bakar untuk produksi sangat tinggi, sehingga mendorong para investor untuk meningkatkan nilai investasinya yang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk sektor sekunder, investasi PMA pada sektor usaha Industri Alat Angkutan & Alat Transportasi Lain memiliki nilai investasi sebesar U\$ 19.048.800. Investasi ini merupakan nilai paling tinggi dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Hal ini disebabkan tingginya nilai sewa angkutan untuk membantu sektor pertambangan batubara dalam meningkatkan tingkat produksinya,

4.2.3. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Berau

Sektoral investasi PMDN yang terjadi di Kabupaten Berau tidak jauh berbeda dengan investasi PMA. Berdasarkan sektor usaha investasi PMDN terdiri atas 3 sektor antara lain, pertama yaitu sektor primer yang terdiri dari (1) tanaman pangan dan perkebunan; (2) peternakan; (3) kehutanan; (4) perikanan; dan (5) pertambangan, kedua yaitu sektor sekunder yang terdiri dari (1) industri makanan; (2) industri tekstil; (3) industri barang dari kulit & alas kaki; (4) industri kayu; (5) industri kertas, barang dari kertas dan percetakan; (6) industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi; (7) industri karet dan plastik; (8) industri mineral non logam; (9) elektronik; (10) jam; (11) industri alat angkutan dan alat transportasi lain; dan (12) industri lainnya, dan ketiga yaitu sektor tersier yang terdiri dari (1) listrik, gas dan air; (2) konstruksi; (3) perdagangan dan reparasi; (4) hotel dan restoran; (5) transportasi, gudang dan komunikasi; (6) perumahan, kawasan industri dan perkantoran; dan (7) jasa lainnya.

Berdasarkan tiga sektor tersebut tidak semua bidang berinvestasi di Kabupaten Berau, dan bidang sektor yang beroperasi di Kabupaten Berau tidak semua perusahaan melaporkan hasil investasinya. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Berau

No	Sektor Usaha	Investasi (Rp) Tahun 2021 Triwulan				Investasi Tahun 2022 Triwulan
		I	II	III	IV	I
I	Sektor Primer					
	1. Tanaman Pangan dan Perkebunan	62,332,822,000	33,916,600,000	7,360,800,000	48,225,500,000	519,646,400,000
	2. Peternakan	-	-	6,000,000,000	-	2,540,000,000
	3. Kehutanan	-	-	20,700,000	464,800,000	-
	4. Perikanan	-	-	-	-	-
	5. Pertambangan	58,603,947,000	22,607,000,000	8,416,900,000	45,038,100,000	592,007,100,000
II	Sektor Sekunder					
	1. Industri Makanan	201,084,800,000	11,787,300,000	6,916,900,000	9,965,800,000	307,699,300,000
	2. Industri Tekstil	-	-	-	-	-
	3. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
	4. Industri Kayu	-	-	-	8,700,000	-
	5. Industri Kertas, Barang dari Kertas & Percetakan	-	-	-	-	-
	6. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	-	-	-	-	502,000,000
	7. Industri Karet dan Plastik	-	-	-	-	-
	8. Industri Mineral Non Logam	-	-	-	-	5,000,000,000
	9. Elektronik	-	-	-	-	-
	10. Jam	-	-	-	-	-
	11. Industri Alat Angkutan & Alat Transportasi Lain	-	-	-	-	-
	12. Industri Lainnya	-	-	-	-	10,000,000
III	Sektor Tersier					
	1. Listrik, Gas dan Air	21,604,102,000	12,877,700,000	14,393,700,000	15,496,200,000	7,448,000,000
	2. Konstruksi	-	2,075,000,000	-	-	500,000,000
	3. Perdagangan dan Reparasi	183,000,000	5,097,000,000	1,850,000,000	10,697,100,000	1,586,900,000
	4. Hotel dan Restoran	-	358.500.000	15,358,500,000	10,400,000	-
	5. Transportasi, Gudang dan Komunikasi	-	796.600.000	-	24,554,100,000	-
	6. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	-	-	-	-	-
	7. Jasa Lainnya	116,916,000	44.000.000	76,100,000	26,700,000	-

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Berau (data olahan)

Realisasi investasi PMDN pada sektor Primer yang tertinggi yakni di bidang pertambangan triwulan pertama tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 592.007.100.000 yang merupakan investasi terbesar dibandingkan tahun

2021. Sedangkan nilai investasi tanaman pangan dan perkebunan memiliki nilai investasi tertinggi kedua yaitu sebesar Rp. 519.646.400.000 dan peternakan sebesar Rp. 2.540.000.000.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada sektor sekunder nilai investasi tertinggi terdapat pada sektor makanan, yang memiliki nilai investasi PMDN sebesar Rp.307.699.300.000 pada triwulan pertama Tahun 2022. Sedangkan bidang sektor terendah terdapat pada sektor industri kayu yaitu sebesar Rp. 8.700.000 di triwulan ke empat pada Tahun 2021.

Pada sektor tersier dari tabel di atas menunjukkan bidang investasi PMDN yang paling tinggi nilai investasinya ialah sektor transportasi, gudang dan komunikasi sebesar Rp. 24,554,100,000 pada triwulan ke empat di Tahun 2021. Sedangkan investasi yang paling rendah terdapat pada investasi di bidang hotel dan restoran sebesar Rp. 10.400.000 di triwulan ke empat tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi yang menyebabkan peluang pada sektor hotel dan restoran tidak terlalu banyak memberikan profit yang tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya seperti listrik, gas dan air ataupun perdagangan dan reparasi.

4.3. Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Berau

4.3.1. Potensi dan Peluang Investasi di Sektor Pertanian

Luas panen tanaman padi di Kabupaten Berau tahun 2021 adalah 5.756,54 ha menurun sebesar 10,91 % dibanding tahun 2020 dan menurun 10,08 % dibanding tahun 2018. Berarti terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam hal luas panen padi di Kabupaten Berau. Penyebab penurunan luas lahan maupun luas panen, awalnya dikarenakan adanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan beberapa lahan tidak bisa dikelola secara optimal, karena dilarang membakar. Lahan maupun tanah tidak termasuk dalam pendataan sehingga drastis mengalami penurunan (Tabel 4.8)

Tabel 4.8. Luas Panen Padi di Kabupaten Berau (ha), 2018-2021

Kabupaten Berau	Luas Panen			
	2018	2019	2020	2021
	6.402,00	4.771,22	6.461,68	5.756,54

Sumber: BPS Kab. Berau, 2019 - 2022

Produksi padi dan beras di Kabupaten Berau pada tahun 2021 seperti halnya luas panen menurun dibanding tahun 2020. Produksi padi pada tahun 2021 sebanyak 22.364,87 ton menurun 4,23% dibanding tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada produksi beras dari 13.513,55 ton pada tahun 2020 menjadi 13.008,91 pada tahun 2021, berarti menurun 3,73%.

Tabel 4.9. Produksi Padi dan Beras di Kabupaten Berau (ton), 2018-2021

Tahun	Produksi Padi	Produksi Beras
2018	19.422,59	11.239,34
2019	16.739,31	9.686,59
2020	23.352,73	13.513,55
2021	22.364,87	13.008,91

Sumber: BPS Kab. Berau, 2019 - 2022

Berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan semusim juga dibudidayakan di Kabupaten Berau. Komoditas yang banyak dikembangkan di Kabupaten Berau yaitu cabai rawit, yang pada tahun 2021 dibudidayakan pada areal seluas 403,29 ha. Komoditas lain yang banyak dikembangkan adalah kangkung dan bayam. Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim lainnya juga cukup banyak dibudidayakan namun dalam skala luasan yang lebih kecil.

Tabel 4.10. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (ha), 2017–2021

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Bawang Daun	22	22	17	23	95,91
Bawang Merah	47	54	9	20	17
Bayam	119	115	93	158	215,73
Buncis	41	44	40	35	19,2
Cabai Besar	72	92	89	54	82,2
Cabai Rawit	122	155	153	357	403,29
Jamur	0,018	0,0144	0,0164	0,0449	0,1350
Kacang Panjang	111	126	103	319	189,31
Kangkung	114	116	100	151	253,86
Ketimun	83	74	70	210	142,93
Labu Siam	0	8	8	11	12,25
Melon	3	9	8	3	1
Petsai/Sawi	108	104	100	155	169,11

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Semangka	124	116	95	70	75,3
Terung	94	91	91	331	185,03
Tomat	76	80	73	204	147,51

Sumber: BPS Kab. Berau, 2018 - 2022

Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim tahun 2017 – 2021 seperti halnya areal panen juga berfluktuasi, namun beberapa komoditas menghasilkan produksi lebih banyak dibanding komoditas lainnya. Pada tahun 2021, tomat merupakan kelompok tanaman sayuran dan buah-buahan semusim dengan produksi paling banyak yaitu 13.529,10 kw, diikuti terong menghasilkan 12.106,30 kw dan cabe rawit sebesar 11.953,32 kw (Tabel 4.11)

Tabel 4.11. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (kw), 2017–2021

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Bawang Daun	475	283	682	1.005	815,11
Bawang Merah	3.996	2.591	408	636	134
Bayam	1.134	2.126	2.595	4.637	7.583,25
Buncis	719	788	847	239	73,9
Cabai Besar	1.336	1.217	1.476	1.300	3.504,72
Cabai Rawit	2.916	3.292	2.399	12.163	11.953,32
Jamur	2.520	1.378	2.006	1.252	51,63
Kacang Panjang	1.569	1.872	2.067	10.046	9.474,40
Kangkung	2.669	2.445	3.080	3.439	11.879,70
Ketimun	1.320	1.477	2.014	14.399	9.215,40
Labu Siam	0	155	152	24	55
Melon	68	99	118	265	34
Petsai/Sawi	5.756	4.835	3.728	5.677	10.619,30
Semangka	16.204	12.707	9.389	4.850	5.572,00
Terong	1.447	1.586	1.912	27.823	12.106,30
Tomat	997	1.349	1.494	5.983	13.529,10

Sumber: BPS Kab. Berau, 2018 - 2022

Tanaman buah tropis memang sangat banyak dibudidayakan di Kabupaten Berau. Tanaman pisang merupakan komoditas dari kelompok buah-buahan yang paling banyak produksinya. Pada tahun 2021 produksi

pisang di Kabupaten Berau sebesar 37.171,32 kw disusul dengan buah duku/langsat/kokosan yang memproduksi sebanyak 27.214,68 kw dan buah rambutan sebesar 23.665,28 kw. Buah-buahan lain yang banyak dihasilkan Kabupaten Berau disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Produksi Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (kw), 2017-2021

Jenis Tanaman	2017	2018	2019	2020	2021
Alpukat	3.930	2.684	13.140	6.834	2.366,32
Belimbing	620	387	246	263	131,55
Duku/Langsat/Kokosan	1.589	11.173	42.072	36.850	27.214,68
Durian	2.803	10.273	21.079	12.233	4.425,44
Jambu Air	802	974	1.385	1.836	975
Jambu Biji	457	1.510	1.373	2.575	1.747,16
Jengkol	36	27	26	5	125,95
Jeruk Besar	1.873	388	1.438	3.659	2.190,00
Jeruk Siam/Kepron	5.336	13.384	24.819	16.162	6.356,00
Mangga	5.998	5.112	2.709	2.695	2.253,00
Manggis	128	54	441	435	18,35
Melinjo	44	69	49	31	137,5
Nangka/Cempedak	16.997	53.469	26.979	28.799	14.750,16
Nenas	1.109	1.216	9.186	9.368	670,17
Pepaya	5.433	6.206	9.472	10.264	13.530,28
Petai	469	533	724	761	787,46
Pisang	103.114	88.984	89.279	50.290	37.171,32
Rambutan	48.806	16.842	28.767	12.045	23.665,28
Salak	1.439	1.613	425	413	595,5
Sawo	962	1.092	737	857	3.283,80
Sirsak	1.304	1.111	1.433	1.095	1.048,20
Sukun	3.753	2.697	1.847	2.480	5.842,86

Sumber: BPS Kab. Berau, 2018 - 2022

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling luas dibudidayakan di Kabupaten Berau dan luas areal tanamnya terus meningkat. Pada tahun 2021, luas areal tanam komoditas perkebunan ini adalah 141.086,94 ha, yang tersebar pada 11 kecamatan. Dua kecamatan yang tidak ada areal budidaya kelapa sawit adalah Tanjung Redeb dan Maratua. Areal tanam kelapa sawit paling luas pada tahun 2021 terdapat di

Kecamatan Segah yaitu 39.323,37 ha yang berarti 27,87 % dari luas areal tanam kelapa sawit di Kabupaten Berau.

Komoditas perkebunan lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Berau adalah karet, lada, kelapa, kakao dan kopi. Areal tanam karet di Kabupaten Berau pada tahun 2021 seluas 4.660,33 ha yang tersebar pada 11 dari 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Seperti halnya kelapa sawit, dua kecamatan yang tidak membudidayakan karet adalah Tanjung Redeb dan Maratua. Areal tanam karet paling luas terdapat di Kecamatan Kelay yaitu 2.060,20 ha, berarti 44,21% tanaman karet di Kabupaten Berau berada di Kecamatan Kelay. Kecamatan lain yang banyak mengembangkan tanaman karet adalah Talisayan.

Tanaman kelapa dihasilkan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Berau dengan areal tanam pada tahun 2021 seluas 2.390,17 ha, areal tanam paling luas di Kecamatan Biduk-Biduk seluas 1.401,00 ha.

Areal tanam lada di Kabupaten Berau pada tahun 2021 seluas 2.611,60 meningkat 1,68 % dibanding tahun 2020. Penanaman lada tersebut tersebar pada 11 kecamatan. Kecamatan yang tidak membudidayakan seperti halnya kelapa sawit dan karet adalah Tanjung Redeb dan Maratua. Areal penanaman lada paling luas di Kecamatan Gunung Tabur seluas 726,00 ha

Luas areal tanam kakao pada tahun 2021 adalah 984,30 ha menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan areal penanaman kakao yang terus menurun. Terdapat 3 kecamatan yang tidak mengembangkan kakao yaitu Buduk-Biduk, Maratua dan Tanjung Redeb. Penanaman kakao paling luas tahun 2021 adalah Sambaliung.

Tanaman perkebunan lain yang dibudidayakan dalam skala yang lebih kecil dibanding komoditas perkebunan lain adalah kopi, yang pada tahun 2021 mempunyai areal tanam 59,50 ha yang dikembangkan pada 6 kecamatan yaitu Talisayan, Biduk-Biduk, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Batu Putih dan Biatan. Areal budidaya kopi paling luas di Kecamatan Talisayan yaitu 28 ha. (Tabel 4.13).

Tabel 4.13. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (ha), 2018 - 2021

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
Kelay	32.916,18	22,00	2.060,20	-	134,00	8,00
Talisayan	15.100,38	61,00	1.480,63	28,00	18,00	196,00
Tabalar	1.115,00	79,00	18,00	-	30,00	167,00
Biduk-Biduk	700,92	1.401,00	28,00	4,00	-	68,00
Pulau Derawan	9.573,19	108,00	17,00	-	26,00	109,00
Maratua	-	256,00	-	-	-	-
Sambaliung	900,00	36,80	321,00	-	457,30	465,10
Tanjung Redeb	-	15,37	-	-	-	-
Gunung Tabur	7.209,00	45,00	64,00	7,00	113,50	726,00
Segah	39.323,37	55,00	306,00	-	126,00	33,00
Teluk Bayur	2.008,00	88,00	225,00	0,50	36,50	64,50
Batu Putih	18.120,89	156,00	92,50	7,00	11,00	91,00
Biatan	14.120,01	67,00	48,00	13,00	32,00	684,00
Total 2021	141.086,94	2.390,17	4.660,33	59,50	984,30	2.611,60
Total 2020	139.315,14	2.428,17	5.105,15	80,50	1.253,05	2.568,50
Total 2019	135.090,76	2.443,17	4.586,36	87,50	1.625,55	2.568,50
Total 2018	127.782,59	2.559,97	4.542,30	103,50	1.677,55	2.567,90

Sumber: BPS Kab. Berau 2019 - 2022

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Berau. Produksi kelapa sawit Kabupaten Berau Tahun 2021 sebanyak 2.233.712,84 ton, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (2018, 2019 dan 2020). Kecamatan Segah merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Kabupaten Berau yaitu menghasilkan 651.029,84 ton pada tahun 2021 yang berarti 29,15% dari produksi kelapa sawit Kabupaten Berau.

Komoditas perkebunan lainnya yang banyak dihasilkan Kabupaten Berau adalah karet. Produksi karet ini berfluktuatif, dengan produksi terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 6.949,93 ton, mengalami peningkatan sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya (Tabel 4.14).

Tabel 4.14. Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Berau (ton), 2021

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
Kelay	375.996,49	23,92	6.486,00	-	25,50	7,70
Talisayan	225.166,05	65,48	93,62	6,96	20,86	61,75
Tabalar	15.948,00	31,60	-	-	19,20	224,73

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
Biduk-Biduk	776,47	640,17	-	0,54	0,00	6,88
Pulau Derawan	121.160,54	53,80	0,85	-	1,60	157,50
Maratua	-	540,30	-	-	0,00	
Sambaliung	10.500,00	31,52	210,32	-	247,17	198,80
Tanjung Redeb	-	30,96	-	-	0,00	
Gunung Tabur	181.174,43	53,56	8,55	3,09	57,16	253,70
Segah	651.029,84	26,26	76,80	-	81,74	1,38
Teluk Bayur	41.812,15	85,72	39,44	0,08	27,40	5,75
Batu Putih	404.108,09	61,12	29,15	0,41	15,36	12,11
Biatan	206.040,78	22,24	5,20	1,72	17,64	326,50
Total 2021	2.233.712,84	1.666,64	6.949,93	12,80	513,63	1.256,80
Total 2020	2.223.826,19	3.482,74	81,90	11,66	787,66	827,02
Total 2019	2.014.320,00	4.747,67	205,38	14,56	680,33	1.066,54
Total 2018	2.007.823,37	5.995,19	211,298	9.497,00	661,14	1.029.397

Sumber: BPS Kab Berau, 2019 - 2022

Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Berau tahun 2020 didominasi oleh sapi, kambing dan babi. Sapi merupakan ternak yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Berau pada tahun 2020. Populasi Sapi pada tahun tersebut sebanyak 15.210 ekor yang tersebar pada 12 kecamatan kecuali Maratua. Kecamatan yang paling banyak terdapat sapi adalah Talisayan dan diikuti Sambaliung.

Ternak kedua yang paling banyak terdapat di Kabupaten Berau adalah kambing, dengan jumlah populasi sebanyak 14.407 ekor juga tersebar di 12 kecamatan kecuali Maratua. Populasi kambing terbanyak di Kecamatan Talisayan yaitu 2.903 ekor.

Selain sapi dan kambing, ternak yang banyak terdapat di Kabupaten Berau pada tahun 2020 adalah babi, yang tersebar pada tujuh kecamatan. Populasi terbanyak terdapat di Kecamatan Kelay dengan jumlah populasi 1.008 ekor. Ternak lain yaitu kerbau dan kuda diusahakan masyarakat namun dalam jumlah yang terbatas dan hanya pada beberapa kecamatan. (Tabel 4.15).

Tabel 4.15. Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Berau Menurut Kecamatan (ekor), 2020

Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
Kelay	132	16	-	738	1.008
Talisayan	2.903	903	-	2.109	228
Tabalar	853	6	-	464	-
Biduk-Biduk	1.464	2	1	1.167	-
Pulau Derawan	26	-	-	411	-
Maratua	-	-	-	-	-
Sambaliung	2.573	8	4	670	241
Tanjung Redeb	362	1	-	976	-
Gunung Tabur	1.435	185	5	248	-
Segah	1.191	15	-	1.286	379
Teluk Bayur	1.876	15	-	1.286	440
Batu Putih	1.079	51	1	1.663	12
Biatan	1 508	46	-	4.127	103
Jumlah 2020	15.210	772	11	14.407	3.082
Jumlah 2019	15.240	720	2	15.711	3.277
Jumlah 2018	14.658	604		14.215	3.364
Jumlah 2017	14.518	572	17	13.559	3.230
Jumlah 2016	14.408	478	18	8.201	1.542

Sumber : BPS, Kab.Berau, 2017 - 2021

Ternak unggas yang paling banyak dikembangkan di Kabupaten Berau tahun 2021 adalah ayam buras dengan populasi sebanyak 364.400 ekor menurun 3,16 % dibanding tahun 2020. Populasi ayam buras di Kabupaten Berau tersebar hampir merata di seluruh kecamatan dengan populasi terbanyak di Kecamatan Teluk Bayur yaitu 81.141 ekor atau sekitar 30,47 % dari populasi ayam buras di Kabupaten Berau. (Tabel 4.16)

Tabel 4.16. Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Berau Menurut Kecamatan (ekor), 2020

Kecamatan	Itik	Ayam Buras	Ayam Pedaging	Ayam Petelur
Kelay		10.428	1.030	991
Talisayan	1.111	17.379	169	17.120
Tabalar	2.467	2.196	-	22.100
Biduk-Biduk	327	9.023	1.200	-
Pulau Derawan	42	9.222	250	-
Maratua	-	1.145	-	-
Sambaliung	3.249	24.991	96.445	104.895
Tanjung Redeb	808	71.391	23.890	3.840

Kecamatan	Itik	Ayam Buras	Ayam Pedaging	Ayam Petelur
Gunung Tabur	18.933	10.053	76.711	50.480
Segah	721	7.347	1.045	6.032
Teluk Bayur	5.425	81.141	22.000	18.480
Batu Putih	389	11.889	1.250	993
Biatan	2.082	10.053	955	4.000
Jumlah 2020	35.554	266.258	224.945	228.931
Jumlah 2019	37.625	277.338	504.829	196.418
Jumlah 2018	32.460	280.567	401.367	145.398
Jumlah 2017	131.817	279.052	1.441.143	111.651
Jumlah 2016	103.586	237.464	2.098.995	48.000

Sumber : BPS, Kab.Berau, 2017 - 2021

Potensi produksi perikanan di Kabupaten Berau diperkirakan sebesar 104.915,00 ton/tahun yang dihasilkan dari kegiatan penangkapan maupun budidaya. Sebagian besar potensi produksi itu diharapkan dari kegiatan budidaya. Produksi perikanan di kabupaten Berau hanya mencapai sekitar 25% dari potensi produksi tersebut. Sebagai contoh produksi perikanan Kabupaten Berau sebesar 25.782,39 ton yang sebagian besar dihasilkan dari kegiatan penangkapan lebih khusus perikanan laut.

Tabel 4.17. Potensi dan Produksi Perikanan Kabupaten Berau

No	Kegiatan	Potensi Produksi (Ton/Tahun)	Produksi (Ton)					Luas (ha) 2021
			2017	2018	2019	2020	2021	
A	Penangkapan							
1	Perikanan Laut	35.000,00	16.954,20	17.107,20	20.529,49	18.988,84	21.779,62	
2	Perairan Umum	8.950,00	1.262,30	1.273,30	1.528,77	1.460,14	1.622,53	
B	Budidaya							
1	Payau (tambak)	31.275,00	1.647,50	1.843,10	1.822,90	1.754,90	1.821,02	5.590,15
2	Kolam	1.070,00	337,90	340,50	336,90	344,86	381,20	46,00
3	Keramba		22,04	24,95	42,50	21,08	39,64	0,18
4	K. Jaring Apung	28.620,00	192,78	136,10	154,10	139,15	138,38	0,42
Jumlah		104.915,00	20.416,52	20.725,15	24.414,66	22.708,97	25.782,39	5.636,75

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Berau , 2022

4.3.2. Potensi dan Peluang Investasi di Industri Pengolahan (Industri Sedang dan Besar)

Subsektor Industri di Kabupaten Berau lebih banyak mencakup kegiatan seperti Industri pengolahan hasil perkebunan contohnya mengolah TBS menjadi CPO. Kontribusi industri pengolahan dalam perekonomian

Kabupaten Berau masih cukup rendah dan berkisar di bawah 5% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, besarnya kontribusi kategori industri pengolahan mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 4,77 % dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 – 2021). Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, angka kontribusi kategori ini masing-masing 4,16% (2016), 4,06% (2017), 4,05% (2018) dan 4,07% (2019). Peningkatan angka kontribusi ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit yang merupakan bahan baku dalam industri pengolahan CPO yang beroperasi di Kabupaten Berau menjadi sebanyak 11 unit. adapun Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.786,43 Ha meliputi:

- Peruntukan industri besar berupa kawasan industri di Kecamatan Sambaliung, Batu Putih dan Biduk Biduk;
- Peruntukan industri menengah meliputi:
 - Kawasan peruntukan pabrik es meliputi: kampung Sukan dan Tanjung Perengat, di Kecamatan Sambaliung; kampung Giring-giring dan kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk Biduk;
 - Kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb;
 - Kawasan industri perikanan Kecamatan Batu Putih.

Tabel 4.18. Potensi Industri Besar dan Menengah di Kabupaten Berau

Kegiatan	Jenis Industri	Kecamatan
Industri Besar	Pengolahan <i>Crude Palm Oil</i> (CPO)	Sambaliung, Batu Putih dan Biduk-biduk
Industri Menengah	1. Pabrik Es 2. Pengerjaan Logam 3. Industri Perikanan	1. Kampung Sukan dan Tanjung Perengat (Sambaliung), Kampung Giring-giring dan Teluk Sulaiman (Biduk-biduk) 2. Tanjung Redeb 3. Batu Putih

Sumber : RPJMD Kab. Berau Tahun 2021 – 2026

4.3.3. Potensi dan Peluang Investasi di Pembangunan Pembangkit Listrik

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Berau, kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar adalah kategori pertambangan dan

penggalian yaitu dengan kontribusi sebesar 56,43 % pada tahun 2020. Dalam kategori pertambangan dan penggalian itu sendiri, sebanyak 82,27 % merupakan kontribusi dari pertambangan batu bara. Kenaikan dan penurunan pada kategori pertambangan dan penggalian sangat bergantung pada eksplorasi dan eksploitasi batu bara yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau.

Di sektor energi, Kabupaten Berau sesuai dengan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026, fokus pada sistem jaringan energi , yang terdiri dari:

- a. Pengembangan Depo BBM berupa pengembangan depo BBM di Kecamatan Gunung Tabur.
- b. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:
 - 1) Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kecamatan; dan
 - 2) Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) pada lokasi yang strategis.
- c. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati 3 x 7 MW dan 1 x 12 di Kecamatan Gunung Tabur;
 - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sambaliung 7 MW di Kecamatan Sambaliung;
 - 3) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Bayur 2 x 7 MW di Kecamatan Teluk Bayur;
 - 4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik meliputi:
 - a) Pulau Derawan Kec. Derawan 170 KWP (Existing)
 - b) Biduk-biduk : 350 kwp (Rencana)
 - c) Batu Putih : 170 kwp (Rencana)
 - d) Talisayan : 350 kwp (Rencana)
 - e) Tabalar : 170 kwp (Rencana)
 - f) Maratua : 170 kwp (Rencana)
 - g) Kelay : 170 kwp (Rencana)

- h) Segah : 170 kwp (Rencana)
- 5) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Kelay;
- 6) Pembangunan energi alternatif meliputi:
 - a) Pembangkit listrik tenaga angin/bayu;
 - b) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro; dan
 - c) Pembangkit energi biogas.
- 7) Pembangunan Gardu Induk (GI) baru meliputi:
 - a) Kecamatan Teluk Bayur (Existing)
 - b) Kecamatan Teluk Bayur (Rencana)
 - c) Kecamatan Sambaliung (Rencana)
- d. Pengembangan Jaringan tranmisi tenaga listrik terdiri dari :
 - 1) Pengembangan saluran udara tegangan listrik (SUTT) 150 KV interkoneksi Tanjung Redeb - Tanjung Selor
 - 2) Pembangunan saluran udara tegangan menengah (SUTM) meliputi :
 - a) SUTM 20 KV dari Teluk Bayur - PLTD Sambaliung
 - b) SUTM 20 KV dari Tanjung Batu - Batu Batu (Gunung Tabur)

Rencana sistem jaringan energi merupakan prasarana yang akan menjadi potensi kawasan engeri di Kabupaten Berau yang dimana akan dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti sistem jaringan energi. Berikut tabel potensi kawasan energi di Kabupaten Berau.

Tabel 4.19. Potensi Kawasan Energi di Kabupaten Berau

Kegiatan	Jenis	Kecamatan
Depo BBM	Bahan Bakar Minyak	Gunung Tabur
Jaringan pipa minyak dan gas bumi	SPBU dan SPBE	Seluruh Kecamatan (Lokasi Strategis)
Pembangkit tenaga listrik dan gardu induk	PLTU, PLTD, PLTS dan PLTA	Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur, Derawan dan Kelay
Pengembangan Jaringan tranmisi tenaga listrik	SUTT dan SUTM	Tj. Redeb - Sabaliung, Tj Batu - Gunung Tabur

Sumber : RPJMD Kab Berau Tahun 2021 – 2026

Dalam penggunaan listrik, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Berau sudah menggunakan listrik dari PLN. Pada tahun 2020, sebanyak 94,53 % rumah tangga di Kabupaten Berau menggunakan listrik dari PLN. Sekitar 5 % menggunakan listrik Non PLN dan sekitar 0,46% rumah tangga di Kabupaten Berau belum menggunakan listrik.

Tabel 4.20. Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Berau Tahun 2017-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan					
- Listrik PLN	87,95	88,36	90,77	87,21	94,53
- Listrik Non PLN	10,40	9,49	8,13	12,58	5,01
- Bukan Listrik	1,65	2,15	1,10	0,21	0,46

Sumber : RPJMD Kab Berau Tahun 2021 - 2026

4.3.4. Potensi dan Peluang Investasi di Pertambangan dan Penggalian

Fokus penanaman modal dalam sektor energi di Kabupaten Berau dalam sektor energi melalui pengembangan kawasan peruntukan pertambangan Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026, kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas tiga kawasan, yaitu Kawasan peruntukan pertambangan di kelompokkan menjadi 3 yaitu :

- 1) Wilayah Usaha Pertambangan Batubara.
- 2) Wilayah Usaha Mineral Logam.
- 3) Wilayah Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Untuk kawasan wilayah Usaha Pertambangan Batubara tersebar pada 10 (sepuluh) lokasi/kecamatan yaitu : Kecamatan Biatan; Kecamatan Biduk Biduk; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Kelay; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Teluk Bayur.

Pada kawasan wilayah mineral logam seperti Emas, Galena, dan Seng terdapat pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tabalar.

Sedangkan untuk Wilayah usaha mineral bukan logam seperti Pasir kuarsa, dolomite, kalsit, batu gamping untuk semen dan clay terdapat pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu : Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Pulau Derawan dan dan Kecamatan Segah, untuk daerah penghasil bebatuan seperti Granit, granodiorit, andesit, tanah urug, kristal kuarsa, kerikil sungai, batu kali, sirtu, tanah urukan setempat, batugamping, pasir laut terdapat pada 2 (dua) Kecamatan yaitu : Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah (granit dan granodiorit, kristal kuarsa).

Tabel 4.21. Potensi Kawasan Pertambangan di Kabupaten Berau

Golongan Komoditas (berdasarkan PP 23/2010)	Jenis Komoditas	Kecamatan
Pertambangan Batubara	Batubara	Kecamatan Biatan; Kecamatan Biduk Biduk; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Kelay; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Teluk
Mineral Logam	Emas, Galena, dan Seng	Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tabalar
Mineral Bukan Logam	Pasir kuarsa, dolomite, kalsit, batu gamping untuk semen dan clay	Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Segah
Batuan	Granit, granodiorit, andesit, tanah urug, kristal kuarsa, kerikil sungai, batu kali, tanah urukan setempat, batugamping, pasir laut	Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah (granit dan granodiorit, kristal kuarsa)

Sumber : Pemkab Berau (beraukab.go.id) dan RPJMD Kab. Berau Tahun 2021-2026

4.3.5. Potensi dan Peluang Investasi di Sektor Pariwisata

Kabupaten Berau memiliki potensi pariwisata sangat besar. Keunggulan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Berau, dianggap sebagai sektor penting yang harus mendapat dan dikembangkan oleh pemerintah. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Berau terbentuk dari kondisi geografis, sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Berau.

Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi obyek laut/bahari. Potensi wisata yang berasal dari sejarah meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah. Potensi wisata yang berasal dari budaya meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Berau dengan segala kebudayaannya. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur, berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, pemerintah pusat telah membagi ke dalam 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan 12 (dua belas) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) sebagai berikut:

- DPN 1 yaitu Long Bagun-Melak dan sekitarnya, meliputi 3 KPPN mencakup Long Apari dan sekitarnya, Long Bagun dan sekitarnya dan Melak-Kersik dan sekitarnya.
- DPN 2 yaitu Tenggarong-Balikpapan dan sekitarnya, meliputi 5 KPPN mencakup Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Samarinda dan sekitarnya, Bontang-Sangata dan sekitarnya, Balikpapan dan sekitarnya.
- DPN 3 yaitu: Derawan-Kayan Mentarang dan sekitarnya, mencakup Tanjung Redeb dan sekitarnya, Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya, Kayan-Mentarang dan sekitarnya, dan Tarakan dan sekitarnya.

Kabupaten Berau memiliki banyak objek wisata yang cukup menarik dan potensial untuk dipasarkan. Namun, objek-objek wisata di Kabupaten Berau belum tertata dan dikembangkan secara baik dan berstandar kepariwisataan seperti infrastruktur jalan yang belum memadai. Jenis wisata di Kabupaten Berau diklasifikasikan berdasarkan 3 (tiga) jenis wisata yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Berikut tabel potensi obyek wisata dan daya tarik wisata berdasarkan klasifikasi tersebut.

Tabel 4.22. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Berau

No	Nama Obyek Wisata	Klasifikasi Obyek Wisata	Lokasi
1.	1. Air Terjun Tirta Kencana	Alam	Kec. Talisayan
	2. Goa Talisayan		
	3. Riang Balesung		
	4. Pantai Asmara		

No	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Obyek Wisata	Lokasi
2.	1. Pantai Pasir Putih		Kec. Pulau Derawan
	2. Gusung Batimbang		
	3. Gusung Tenggalau		
	4. Sumur Tua		
	5. Pulau Samama		
	6. Pulau Sangalaki		
	7. Pantai Tanjung Batu		
	8. Kuburan Nisan Kuda	Budaya	
	9. Dailling		
	10. Pantai Karang Tigau	Alam	
	11. Taman Laut		
3.	1. Bumi Perkemahan Hutan Tanggap	Alam	Kec. Teluk Bayur Hutan Tangap Labanan
	2.Bangunan Bersejarah (Peninggalan Belanda)	Budaya	
4.	1. Pulau Maratua	Alam	Kec. Maratua
	2. Pulau Kakaban		
	3. Danau Haji Buang		
	4. Danau Ubur-Ubur		
	5. Gua Angkal-angkal		
	6. Payung-Payung		
	7. Hutan Magrop (Teluk Pea)		
	8. Goa Pangeran		
	9. Goa Tangkapa		
	10. Panji-Panji		
5.	1. Bekas Istana Kesultanan Gn.Tabur	Budaya	Kec. Gunung Tabur
	2.Cagar Alam Gunung Tabur	Alam	
	3.Makam Raja Kesultanan	Budaya	
	4..Bendungan Merancang		
6.	1. Keraton Kerjaan Sambaliung	Budaya	Kec. Sambaliung
	2. Goa Tembakau	Alam	
	3. Air Terjun di Bawah Batu	Alam	
7.	1. Masjid Jami'	Budaya	Kec. Tanjung Redeb
	2. Wisata Kuliner	Kuliner	
	3.Taman Kota	Minat Khusus	
8.	1. Tari Leleng Dayak Berau	Budaya	Kec. Kelay Kampung Merasa
	2. Gua Tembakau	Alam	
	3. Batu Tembakau		
	4. Batu Anjing		
	5. Batu Kapang		
	6. Batu Lingun		
	7. Gua lingun		
	8. Tebing Batu Putih		
	9. Goa Ching Yang		

No	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Obyek Wisata	Lokasi
9.	1. Danau Labuan Cermin	Alam	Kecamatan Biduk-Biduk
	2.Air Terjun Wirittasi		
	3. Air Terjun Danum Taputar		
	4. Pantai Sungai Serai		
	5. Pantai Teluk Sulaiman		
10.	1. Danau Ikan Lahang	Alam	Kecamatan Segah
	2. Hutan Alam Sei Tangap		
	3. Danau Aji Tua		
	4. Arum Jeram (Sungai Gie)		
	5. Desa Budaya	Budaya	
11	1. Air Panas Asin	Alam	Kecamatan Biatan
12	1. Makam Raja Alam	Budaya	Kecamatan Batu Putih
	2. Danau Ne'Lenggo	Alam	
	3. Taman Buruh Batu Putih		

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Tabel 4.23. Beberapa Potensi dan Daya Tarik Obyek Wisata Kabupaten Berau

No.	Nama Objek	Bentuk Daya Tarik/Atraksi
1	Wisata Bahari Pulau Derawan	Pantai, akuarium laut, panorama alam pasir putih, olahraga pantai di Derawan
2	Bumi Pekemahan Tangap	Pemandangan alam, tempat berkemah, pusat aktivitas kegiatan pramuka Teluk Bayur
3	Pulau Samama	Panorama alam, Pasir Putih, Derawan
4	Pulau Kakaban	Panorama alam, hamparan terumbu karang, Derawan
5	Pulau Maratua	Panorama alam, pasir putih, Maratua
6	Taman Laut	Panorama alam, akuarium laut, Derawan dan sekitarnya
7	Taman Cendana	Taman rekreasi keluarga
8	Taman Sanggam	Taman rekreasi keluarga
9	Taman Segah	Wisata kuliner di sepanjang Jl. P. Antasari ke Jl. A. Yaniditepi Sungai Segah sebagai tempat rekreasi keluarga, untuk menikmati lebih baik pada malam hari.
10	Pulau Sangalaki	Pulau tempat penyu bertelur, Derawan.
11	Keraton Kerajaan Gunung Tabur	Wisata sejarah, merupakan peninggalan kerajaan yang pernah hidup ratusan tahun silam, Gunung Tabur.
12	Keraton Kerajaan Sambaliung	Wisata sejarah, merupakan peninggalan kerajaan yang pernah hidup ratusan tahun silam, Sambaliung.

No.	Nama Objek	Bentuk Daya Tarik/Atraksi
13	Kuburan, Sumur Tuadan Benteng Belanda Pulau Derawan	Wisata sejarah yang merupakan peninggalan jaman penjajahan Belanda, Derawan.
14	Batarbang	Kesenian tradisional bernuansa Islam yang dipertunjukkan dalam hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya serta penyambutan tamu, di hampir seluruh tempat di Kabupaten Berau.
15	Tari Dalling	Tarian yang berasal dari wilayah pesisir yang mempertunjukkan atraksi tarian yang indah, tari suku Bajau.
16	Gusung Batimbang	Akuarium laut, panorama alam pasir putih di Derawan.
17	Gusung Sanggalau	Akuarium laut, panorama alam pasir putih di Derawan.
18	Danau Haji Buang (Pulau Maratua)	Airnya jernih, rasa asin, dihuni oleh ubur-ubur tidak menyengat, Maratua.
19	Danau Ubur-Ubur (Pulau Kakaban)	ubur-ubur tidak menyengat, Derawan (P. Kakaban).
20	Gua Angkal-angkal	Memiliki struktur yang unik, Maratua.
21	Payung-Payung	Batu yang menyerupai payung, Maratua.
22	Hutan Mangrove	Hamparan tumbuhan bakau, Maratua, Teluk Sulaiman.
23	Goa Pangeran	Memiliki struktur yang unik, Maratua.
24	Goa Tangkapa	Memiliki struktur yang unik, Maratua.
25	Tebing Panji-Panji	Pemandangan alam, bisa melihat punggung hewanyang terbang, Maratua.
26	Gua Tembakau	Goa yang ditumbuhi sepucuk tanaman tembakau, Kelay.
27	Batu Anjing	Batu yang menyerupai anjing, Kelay.
28	Batu Kapen	Batu bisa untuk berteduh saat air sungai surut, Kelay.
29	Batu Lungun	Tempat penguburan mayat, Kelay.
30	Gua Lungun	Tempat penguburan mayat, Kelay.
31	Batu Tembak	Batu yang tersusun menyerupai susunan persenjataan, Kelay.
32	Tari Leleng Dayak	Sebuah pertunjukan seni tari dayak, tari Suku Dayak.
33	Tebing Batu Putih	Pemandangan dan lokasi panjat tebing, Kelay.
34	Goa Ching Yang	Goa kecil dan sempit di Kecamatan Kelay.
35	Kampung Bena Baru	Kampung budaya, merupakan kehidupan sehari-hari suku dayak kenyah dengan adat istiadat, musik serta tari-tarian tradisional, dan benda-benda kerajinan/cagar budaya asli dari suku dayak kenyah.

No.	Nama Objek	Bentuk Daya Tarik/Atraksi
36	Danau Labuan Cermin	Airnya jernih dan dua rasa, Biduk-Biduk.
37	Air Terjun Danum Baputar	Airnya jernih dan ketinggian 12 m, Teluk Sulaiman.
38	Air Terjun Wirittasi	Airnya deras dan ketinggian 6 m, Teluk Sulaiman.
39	Pantai Sungai Serai	Wisata keluarga, Tanjung Batu.
40	Pantai Teluk Sulaiman	Pemandangan dan panorama alam, Teluk Sulaiman.
41	Tao Pe Kong	Wisata religi masyarakat Tionghoa di Kabupaten Berau.
42	Kersik	Kehidupan masyarakat dan panorama alam.
43	Penangkaran rusa	Penangkaran rusa.
44	Kuburan Nisan Kuda	Kuburan dengan nisan berbentuk kuda, Derawan.
45	Kawasan Karst Merabu	Goa Purba di Bloyot dan Danau Nyadeng di Kampung Merabu.
46	Lamin Guntur	Wisata dipinggir pantai, Biduk-Biduk.
47	Pulau Sangalaki dan Semama	22 titik potensi bawah laut untuk kegiatan <i>Diving</i> dan <i>Snocling Sport</i>
48	Pulau Maratua dan Kakaban	44 titik potensi bawah laut untuk kegiatan <i>Diving</i> dan <i>Snocling Sport</i>

Potensi pariwisata di Kabupaten Berau sangat besar paling tidak bila dilihat dari jumlah potensi wisata yang sudah didata pada tahun 2020 yaitu sebanyak 246 destinasi wisata. Sebanyak 66 dari 246 potensi pariwisata tersebut merupakan potensi wisata bawah laut yang terdapat di Kecamatan Pulau Derawan (di sekitar Pulau Sangalaki dan Pulau Semama) sebanyak 22 titik dan Kecamatan Maratua (di Pulau Kakaban) sebanyak 44 titik. Potensi wisata tersebut untuk kegiatan *Diving Sport*, *Diving* dan *Snocling*). Berdasarkan definisi Aiest tersebut maka salah satu hal terpenting dari kawasan pariwisata adalah tersedianya akomodasi wisatawan untuk beristirahat. Namun demikian ada aspek yang harus tetap di perhatikan dalam penyediaan akomodasi di kawasan wisata yaitu penyediaan akomodasi atau tempat beristirahat yang memadai dan melibatkan penduduk setempat dalam pengelolaannya. Dengan demikian, penduduk di kawasan daerah wisata dapat memperoleh kesempatan berusaha dengan mendirikan

sebuah penginapan. Bahkan bisa juga dengan memanfaatkan sebagian bangunan yang dimilikinya(biasa disebut dengan *Home Stay*). Selama kurun waktu lima tahun perkembangan jumlah akomodasi di Kabupaten Berau mengalami peningkatan. Pada awalnya ada sebanyak 283 unit akomodasi pada tahun 2016 kemudian terus meningkat menjadi 366 unit akomodasi pada tahun 2020. Peningkatan jumlah akomodasi ini juga saling berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Berau yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu indikator untuk melihat suatu wilayah memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi adalah dari jumlah kunjungan wisatawan. Kabupaten Berau merupakan daerah yang kaya akan tempat wisata, sehingga tentu memiliki banyak tempat wisata yang dikunjungi wisatawan domestik dan asing. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau pada tahun 2016 sebanyak 130.023 kunjungan yang terdiri dari 2.573 wisatawan mancanegara dan 127.450 wisatawan domestik. Sampai dengan tahun 2019, angka ini terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak 8.323 kunjungan wisatawan asing dan 292.692 kunjungan wisatawan domestik. Namun, pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan menurun sebagai akibat adanya pandemi Covid – 19.

Tabel 4.24. Statistik Pariwisata Kabupaten Berau, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Potensi Pariwisata	159	103	172	173	180
Jumlah Akomodasi	283	287	302	349	366
Kunjungan Wisatawan	130.023	207.780	285.880	301.015	127.396
- Wisatawan Mancanegara	2.573	4.376	2.586	8.323	220
- Wisatawan Domestik	127.450	203.404	283.294	292.692	127.176

Sumber: Disbudpar Kab. Berau, 2022

Selain itu yang menjadi salah satu pendukung dan penunjang industri pariwisata adalah jumlah rumah makan. Makanan diakui sebagai alat promosi dan *positioning* destinasi yang efektif, karena makanan memiliki kekhasan suatu daerah yang membedakan suatu daerah dengan daerah

lainnya. Dengan meningkatnya minat dalam masakan lokal, Kabupaten Berau menetapkan fokus rumah makan atau makanan lokal sebagai produk wisata.

Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Berau tahun 2021 sebanyak 157 rumah makan/restoran, yang tersebar pada 9 kecamatan. Paling banyak di Kecamatan Tanjung Redeb yaitu 94 rumah makan/restoran atau 59,87% dari rumah makan/restoran yang ada di Kabupaten Berau. Kecamatan lain yang banyak terdapat rumah makan/restoran adalah Pulau Derawan. Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Berau terus meningkat yaitu 6,08 % dibanding tahun 2020 dan 80,46% dibanding tahun 2017

Tabel 4.25. Jumlah Rumah Makan/ Restoran di Kabupaten Berau, 2017 - 2021

Kecamatan	2020	2021
Kelay	3	3
Talisayan	8	8
Biduk-Biduk	8	8
Pulau Derawan	18	20
Maratua	5	5
Sambaliung	6	6
Tanjung Redeb	92	94
Gunung Tabur	-	3
Teluk Bayur	3	5
Biatan	5	5
Total	148	157
Jumlah Tahun 2019	123	
Jumlah Tahun 2018	91	
Jumlah Tahun 2017	87	

Sumber : Disbudpar Kab. Berau, 2022

4.3.6. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak perekonomian di Kabupaten Berau yang masih dihadapkan pada masalah klasik seperti infrastruktur, perizinan, pemasaran, distribusi dan pembiayaan serta proses pemulihan pasca covid-19. Berkaitan dengan masalah tersebut, untuk itu membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi sangat perlu

dukungan akan terlaksananya sektor riil yang sehat agar dapat mengentaskan kemiskinan melalui penguatan daya beli masyarakat yang lebih baik serta bantuan permodalan dengan bunga ringan.

Keberadaan UMKM dari sudut pandang ekonomi makro, peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari:

- 1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- 2) Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
- 3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
- 5) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspo.

Kemudian dari sisi UMKM, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, jumlah UMKM di Kabupaten Berau pada tahun 2021 sebanyak 13.097 unit. Jika dilihat persebarannya, sebagian besar UMKM terpusat di ibukota Kabupaten yakni Kecamatan Tanjung Redeb yaitu sebanyak 4.592 UMKM atau 35,06% dari total UMKM. Sebaliknya, UMKM yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Biatan yaitu hanya sebanyak 51 UMKM. Data UMKM di Kabupaten Berau tahun 2021 melonjak signifikan dibanding tahun – tahun sebelumnya. Sebagai contoh jika dibanding tahun 2020 maka UMKM di Kabupaten Berau tahun 2021 meningkat 304,98%. Diduga meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Berau pada masa pandemi Covid-19 karena banyaknya pekerja diperusahaan besar yang di mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena tutup atau tidak beroperasinya perusahaan besar tersebut. Sebagian karyawan/buruh perusahaan tersebut dengan ketrampilan yang dimiliki berusaha dengan menekuni UMKM.

Tabel 4.26. Data Perkembangan UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Berau, 2017 – 2021

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Tanjung Redeb	749	806	806	884	4.592
Sambaliung	42	42	42	602	2.419

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Gunung Tabur	75	117	117	104	988
Teluk Bayur	61	63	63	346	1.321
Kelay	8	10	10	33	55
Segah	23	24	24	52	131
Pulau Derawan	61	76	76	147	779
Maratua	22	22	22	200	340
Tabalar	20	23	23	79	502
Biatan	35	51	51	32	51
Talisayan	44	45	45	386	673
Batu Butih	36	39	39	300	351
Biduk-Biduk	48	54	54	69	836
KTP Luar Berau					59
Total	1.224	1.372	1.372	3.234	13.097

Sumber : BPS Kab. Berau, 2018 - 2022

Koperasi sebagai lembaga ekonomi mikro yang berfungsi untuk mensejahterakan penduduk,. Keberadaan koperasi tentunya membawa angin segar bagi para pelaku ekonomi di daerah terutama bagi mereka yang membutuhkan sejumlah dana untuk terus meningkatkan usahanya dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi tersebut.

Jumlah koperasi di Kabupaten Berau terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 terdapat 440 koperasi di Kabupaten Berau, meningkat 4,02% dibanding tahun 2020. Sebaynyak 141 koperasi itu berada di Kecamatan Tanjung Redeb (Tabel 4.27).

Tabel 4.27. Data Perkembangan Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Berau, Tahun 2017 - 2021

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Tanjung Redeb	114	124	130	137	141
Sambaliung	38	40	41	44	46
Gunung Tabur	32	34	36	39	39
Teluk Bayur	40	42	42	44	46
Kelay	25	25	25	27	28
Segah	30	31	35	38	40
Pulau Derawan	10	11	12	13	15
Maratua	1	2	2	2	3
Tabalar	10	11	12	13	14
Biatan	17	17	18	19	19

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Talisayan	25	26	29	30	32
Batu Butih	13	13	13	13	13
Biduk-Biduk	4	4	4	4	4
Total	359	380	399	423	440

Sumber : BPS Kab. Berau, 2018 - 2022

Penguatan ekonomi akar rumput menjadi penting karena dua alasan strategis, yakni, pertama, alasan sosiologis yakni perlu dihindari masyarakat Berau menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, alasan ekonomi. Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BERAU

Penyusunan arah kebijakan penanaman modal diarahkan agar dapat memperbaiki iklim penanaman modal di Kabupaten Berau dengan mengetahui bagaimana persebaran penanaman modal dengan fokus pengembangan pada masing-masing sektor selain itu penanaman modal juga diharapkan dapat bersinergi dan berwawasan lingkungan sehingga kedepannya dapat terus berkelanjutan tanpa harus mengesampingkan aspek lingkungan. Pada Arah kebijakan juga diharapkan dapat memudahkan bagi penanaman modal dalam berinvestasi, promosi serta meningkatkan kerjasama penanaman modal agar dapat memajukan perekonomian di Kabupaten Berau.

Pada tingkat nasional, terdapat beberapa kebijakan penanaman modal antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2007 tersebut, merupakan langkah awal pembaharuan hukum investasi dan merupakan payung hukum didalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia serta merupakan perubahan dan penambahan dari Undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Adapun arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Berau diuraikan berikut ini :

5.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Kebijakan penanaman modal di Kabupaten Berau diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif.

Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain:

- 1) Menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari koordinasi internal.
- 2) Memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat.
- 3) Dapat menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu.
- 4) Mampu menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali.
- 5) Membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

5.2. Persebaran Penanaman Modal

Persebaran penanaman modal dimaksudkan selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah di Berau, Pemerintah Kabupaten Berau perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah .

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal Kabupaten Berau sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik masing-masing kecamatan. Pemerintah Kabupaten Berau melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang kurang berkembang sesuai potensi unggulannya. Hal ini didukung pula

dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi; dan

- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupten Berau khususnya pada daerah atau sektor/subsektor yang selama ini kurang menarik minat investor. Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Berau untuk menarik minat penanam modal agar menanamkan modal adalah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah Kabupaten Berau sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal;
- 3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur.

5.3. Fokus Penanaman Modal

5.3.1. Pertanian

Sektor Pertanian dalam arti luas cukup dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Berau. Berkaitan dengan itu, penanaman modal di Kabupaten Berau difokuskan salah satunya pada pengembangan sektor pertanian.

Fokus pengembangan pertanian terutama pada bidang pertanian di Kabupaten Berau dengan kawasan pertanian lahan basah sebesar 174,68 Ha dan lahan kering sebesar 463,78 Ha, yang terdiri atas beberapa kawasan yaitu :

- Kawasan pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan terdapat di beberapa Kecamatan yang masuk dalam Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Berau seperti di Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan, Mangkajang, Labanan, dan Sido Bangen.

- Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) fokus pada pengembangan pelayanan pengelolaan perkebunan rakyat yang terdapat pada beberapa lokasi seperti Sambakungan, Kasai, Kecamatan Teluk Harapan, Bebanir/Bangun, Tumbit Melayu, Tubaan, Biatan Lempake, Tembudan, Batu Putih, Biduk- Biduk, Merapun, Kecamatan Long Keluh, Merasa, Bukit Makmur, dan Long Laai.

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Kabupaten Berau, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi rencana pola ruang untuk Kawasan lindung dan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 63.846,44 ha meliputi:

- 1) Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 17.468,33 ha meliputi : Kecamatan Biatan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan; dan Kecamatan Teluk Bayur.
- 2) Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 46.378,11 ha meliputi: Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biatan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan; dan Kecamatan Teluk Bayur. Adapun peruntukan lahan pertanian yang telah digunakan atau dimanfaatkan terbagi menjadi 2 yaitu Padi Ladang dan Padi Sawah.

Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Berau berpedoman pada Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang serta Penetapan kawasan Strategis. Arah pemanfaatan ruang Kabupaten Berau untuk Program Perwujudan Kawasan Pertanian:

- 1) Kegiatan Identifikasi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
 - Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Biatan, Teluk Bayur, Segah dan Talisayan

- 2) Kegiatan Identifikasi Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Di tiap kecamatan yang dilalui oleh daerah irigasi
- 3) Kegiatan Masterplan Agropolitan
- 4) Kegiatan Pengembangan Pertanian Organik
- 5) Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Biatan, Teluk Bayur, Segah dan Talisayan
- 6) Kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Sentra Budidaya Tanaman Lahan Kering, Lahan Basah, dan Peternakan
 - Di tiap kecamatan
- 7) Kegiatan Pengembangan Industri Pertanian Berbasis Agro
 - Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Biatan, Teluk Bayur, Segah dan Talisayan

Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas utama berupa sayur- sayuran dan buah-buahan meliputi Kecamatan Talisayan; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Kelay; Kecamatan Biduk-biduk; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Segah; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih.

Kawasan perkebunan merupakan salah satu kawasan paling banyak ditemukan di Kabupaten Berau yaitu kegiatan kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Beberapa jenis perkebunan yang terdapat di Kabupaten Berau selain kelapa sawit yaitu Kelapa, Kakao, Karet dan Kopi yang terdapat hampir disemua Kecamatan. Dari data yang diperoleh, di Kecamatan Kelay terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Kakao, Kecamatan Talisayan terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi dan Kakao, Kecamatan Tabalar terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Kakao, Kecamatan Biduk-biduk terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, dan Kopi, Kecamatan Pulau Derawan terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Kakao, Kecamatan Maratua hanya ada perkebunan Kelapa dan Kakao, Kecamatan Sambaliung terdapat perkebunan Kelapa

Sawit, Kelapa, dan Karet; Kecamatan Tanjung Redeb hanya ada Perkebunan Kelapa; Kecamatan Gunung Tabur terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Kopi; Kecamatan Segah terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, dan Karet; Kecamatan Teluk Bayur terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, dan Karet; Kecamatan Batu Putih terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, Kelapa dan Kopi; Kecamatan Batu Putih terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, dan Kopi; Kecamatan Biatan terdapat perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, dan Kopi.

Kawasan peruntukan peternakan dengan komoditas utama berupa sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi meliputi: Kecamatan Kelay (sapi, kambing, babi); Kecamatan Talisayan (sapi, kerbau, kuda, kambing); Kecamatan Tabalar (sapi, kerbau, kambing); Kecamatan Biduk-Biduk (sapi, kerbau, kuda, kambing); Kecamatan Pulau Derawan (sapi, kambing); Kecamatan Maratua (kambing); Kecamatan Sambaliung (sapi, kambing, babi); Kecamatan Tanjung Redeb (sapi, kerbau, kambing); Kecamatan Gunung Tabur (sapi, kerbau, kambing, babi); Kecamatan Segah (sapi, kambing, babi); Kecamatan Teluk Bayur (sapi, kambing); Kecamatan Batu Putih (sapi, kerbau, kuda, kambing); Kecamatan Biatan (sapi, kerbau, kambing).

Perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Berau. Posisi Kabupaten Berau yang berada pada pesisir Pulau Kalimantan memberikan keuntungan pada produksi perikanan di Kabupaten Berau. Bahkan beberapa kecamatan yang memiliki daerah perairan menjadikan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Dengan dominasi produksi yang lebih 50 persen setiap tahunnya, menjadikan budidaya tambak sebagai budidaya paling menjanjikan dibanding yang lain. Adapun jenis perikanan yang paling banyak dibudidayakan di tambak di Kabupaten Berau adalah bandeng dan udang.

Pengembangan kerapu (budidaya laut) melalui penetapan Kampung Perikanan Budidaya Kerapu di kampung Bone Vilian Kecamatan Maratua (Berdasarkan PerMen Kelautan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022. Saat ini terdapat 70 RTP dan 7 Pokdakan, potensi 10.000 ha dan produksi 90

ton/tahun.

Pengembangan budidaya udang windu (budidaya payau) di Kampung Pagat Betumbuk (luas 7.624 ha dan produksi 1.200 ton/tahun) dan Kampung Sudran (720 ha dan produksi 300 ton/tahun).

Pengembangan budidaya lele menggunakan teknologi Bioflok (Potensi lahan 1.000 ha, eksisting 45 ha dan produksi 656 ton/tahun).

Arahan pengembangan lainnya kedepan adalah pengembangan gurami dan patin di Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung dan Teluk Bayur.

5.3.2. Pertambangan dan Energi

Fokus penanaman modal dalam sektor energi di Kabupaten Berau dalam sektor energi melalui pengembangan kawasan peruntukan pertambangan Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026, kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas tiga kawasan, yaitu Kawasan peruntukan pertambangan di kelompokkan menjadi 3 yaitu :

- 1) Wilayah Usaha Pertambangan Batubara.
- 2) Wilayah Usaha Mineral Logam.
- 3) Wilayah Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Untuk kawasan wilayah Usaha Pertambangan Batubara tersebar pada 10 (sepuluh) lokasi/kecamatan yaitu : Kecamatan Biatan; Kecamatan Biduk Biduk; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Kelay; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Teluk Bayur.

Komoditas mineral logam seperti Emas, Galena, dan Seng terdapat pada 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kelay, Segah dan Tabalar.

Komoditas mineral bukan logam seperti Pasir kuarsa, dolomite, kalsit, batu gamping untuk semen dan clay terdapat pada 3 (tiga) kecamatan yaitu : Gunung Tabur, Pulau Derawan dan Segah. Komoditas batuan seperti granit, granodiortit dan kristal kuarsa terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kelay dan Segah. Kabupaten Berau punya potensi batuan lain seperti andesit, tanah urug, kerikil sungai, batu kali, sirtu, tanah urukan setempat, batugamping, pasir laut.

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Berau, kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar adalah kategori pertambangan dan penggalian yaitu dengan kontribusi sebesar 56,43 % pada tahun 2020. Dalam kategori pertambangan dan penggalian itu sendiri, sebanyak 82,27 % merupakan kontribusi dari pertambangan batu bara. Kenaikan dan penurunan pada kategori pertambangan dan penggalian sangat bergantung pada eksplorasi dan eksploitasi batu bara yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau.

Pada sektor energi di Kabupaten Berau sesuai dengan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026, fokus pada sistem jaringan energi terdiri dari:

- a. Pengembangan Depo BBM berupa pengembangan depo BBM di Kecamatan Gunung Tabur.
- b. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:
 - 1) Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kecamatan; dan
 - 2) Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) pada lokasi yang strategis.
- c. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 x 7 MW dan 1 x 12 di Kecamatan Gunung Tabur;
 - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sambaliung 7 MW di Kecamatan Sambaliung;
 - 3) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Bayur 2 x 7 MW di Kecamatan Teluk Bayur;
 - 4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik meliputi:
 - a) Pulau Derawan Kec. Derawan 170 KWP (Existing)
 - b) Biduk-biduk : 350 kwp (Rencana)
 - c) Batu Putih : 170 kwp (Rencana)
 - d) Talisayan : 350 kwp (Rencana)
 - e) Tabalar : 170 kwp (Rencana)

- f) Maratua : 170 kwp (Rencana)
- g) Kelay : 170 kwp (Rencana)
- h) Segah : 170 kwp (Rencana)
- 5) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Kelay;
- 6) Pembangunan energi alternatif meliputi:
 - a) Pembangkit listrik tenaga angin/bayu;
 - b) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro; dan
 - c) Pembangkit energi biogas.
- 7) Pembangunan Gardu Induk (GI) baru meliputi:
 - a) Kecamatan Teluk Bayur (Existing)
 - b) Kecamatan Teluk Bayur (Rencana)
 - c) Kecamatan Sambaliung (Rencana)
- d. Pengembangan Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri dari :
 - 1) Pengembangan saluran udara tegangan listrik (SUTT) 150 KV interkoneksi Tanjung Redeb - Tanjung Selor
 - 2) Pembangunan saluran udara tegangan menengah (SUTM) meliputi :
 - a) SUTM 20 KV dari Teluk Bayur - PLTD Sambaliung
 - b) SUTM 20 KV dari Tanjung Batu - Batu Batu (Gunung Tabur)

Rencana sistem jaringan energi merupakan prasarana yang akan menjadi potensi kawasan energi di Kabupaten Berau yang dimana akan dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti sistem jaringan energi. Berikut tabel potensi energi di Kabupaten Berau.

5.3.3. Infrastruktur

Fokus ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur

dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan;
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur sesuai dengan peran masing-masing kecamatan dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada kecamatan sedang berkembang dan belum berkembang;
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema partnership Pemerintah-Swasta atau kerjasama Swasta-Pemerintah ;
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan sektor unggulan/prioritas sesuai potensi dan karakteristik Kabupaten Berau.

Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas Kabupaten Berau seperti perumahan merupakan salah satu cara dalam menilai kesejahteraan masyarakat dari segi penggunaan sumber air minum, status kepemilikan rumah, luas lantai tempat tinggal dan penggunaan fasilitas tempat pembuangan air besar. Di Kabupaten Berau urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas PUPR (Air bersih dan Sanitasi) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perumahan). Berkaitan dengan status kepemilikan rumah, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 72,18 % rumah tangga telah menempati rumah miliknya

sendiri, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 66,38 %. Kenaikan ini berbanding terbalik dengan penurunan rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan maupun rumah sewaan yakni dari 21,20 % pada tahun 2019 menjadi 19,23 % pada tahun 2020. Sisanya merupakan rumah tempat tinggal bebas sewa, milik orang tua/sanak/ saudara, dinas ataupun tempat tinggal lainnya.

5.3.4. Industri Pengolahan

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.786,43 ha meliputi:

- Peruntukan industri besar berupa kawasan industri di Kecamatan Sambaliung, Batu Putih dan Biduk Biduk;
- Peruntukan industri menengah meliputi:
 - Kawasan peruntukan pabrik es meliputi: kampung Sukan dan Tanjung Perengat, di Kecamatan Sambaliung; kampung Giring-giring dan kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk Biduk;
 - Kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb;
 - Kawasan industri perikanan Kecamatan Batu Putih.

5.3.5. Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata seluas 31.413 ha yang meliputi : 1) Pengembangan pariwisata alam. 2) Pengembangan wisata sejarah, 3) Pengembangan wisata budaya dan 4) Pengembangan wisata buatan/binaan manusia.

Pengembangan wisata alam meliputi : 1) Wisata Bahari, 2) Minat khusus dan 3) Wisata alam/ekowisata. Pengembangan wisata bahari meliputi kecamatan : 1) Pulau Derawan, 2) Maratua, 3) Biduk-Biduk, 4) Batu Putih dan 5) Talisayan.

Pengembangan wisata minat khusus meliputi kecamatan : 1) Pulau Derawan, 2) Maratua, 3) Biduk-Biduk, 4) Kelay dan 5) Segah.

Pengembangan wisata alam meliputi kecamatan : 1) Pulau Derawan, 2) Tabalar, 3) Biatan, 4) Batu Putih, 5) Biduk-Biduk, 6) Kelay, 7) Segah, 8) Talisayan dan 9) Maratua.

Pengembangan wisata sejarah di kecamatan : 1) Gunung Tabur, 2) Sambaliung, 3) Teluk Bayur, 4) Batu Putih dan Kelay.

Pengembangan wisata budaya dibagi menjadi 3 yaitu : 1) Wisata budaya banua, 2) Wisata budaya dayak dan Wisata Budaya Bajau. Wisata budaya meliputi Kecamatan Gunung Tabur dan Sambaliung, Wisata budaya dayak meliputi Kecamatan Kelay dan Segah dan Wisata budaya Bajau meliputi Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua.

Pengembangan wisata buatan/binaan manusia meliputi : 1) Wisata buatan Tangap dan Danau Tumbit Kecamatan Teluk Bayur, 2) Wisata buatan Bendungan Merancang, Sungai Ulak Kecamatan Gunung Tabur, 3) Wisata buatan kuliner dan belanja di Kecamatan Tanjung Redeb dan 4) Wisata buatan religi di Kecamatan Tanjung Redeb dan Sambaliung.

5.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan ketentuan penting karena terdapat keterkaitan antara penanaman modal dengan lingkungan hidup. Keterkaitan tersebut, bermakna bahwa penanaman modal atau investasi harus dihentikan jika ternyata mengabaikan kelestarian dan kesuburan tanah serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan Lingkungan (green investment), meliputi:

- 1) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, diantaranya pada sektor pangan, pertanian, industri perikanan, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati di darat maupun di dalam laut;
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan;
- 3) Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pencemaran,

- pengurangan pencemaran lingkungan;
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
 - 6) Pengembangan Kabupaten Berau yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan dan bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

Penanaman modal atau investasi di Kabupaten Berau merupakan pengorbanan materi atau non materi pada masa sekarang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi, maka akan tercipta perubahan barang modal baru dan akan menyerap faktor produksi baru (termasuk tenaga kerja). Selanjutnya, investasi tersebut dapat menyebabkan penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut yang pada akhirnya akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi yang dilakukan juga dapat menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru yang padagilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran. Investasi yang dilakukan di suatu daerah diharapkan dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

Terdapat berbagai faktor penentu dalam menarik investor agar menanamkan modalnya di suatu daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

5.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Berau yang masih dihadapkan pada masalah klasik seperti infrastruktur, perizinan, pemasaran, distribusi dan pembiayaan. Berkaitan dengan masalah di atas, penting untuk membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan usaha menengah dan besar, mendukung terlaksananya sektor riil yang sehat ditingkatkan akar rumput, mengentaskan kemiskinan melalui penguatan daya beli yang berkeadilan, penguatan kelembagaan ekonomi bentuk koperasi sebagai bagian dari penguatan daya saing Usaha Mikro dan Kecil sebagai percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Berau, melalui pengamanan mata rantai usaha, dan memperkuat balai balai latihan kerja agar menjadi pemasok tenaga kerja terampil yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Penguatan ekonomi akar rumput menjadi penting karena dua alasan strategis, yakni, pertama, alasan sosiologis yakni perlu dihindari masyarakat Berau menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, alasan ekonomi, yakni senyatanya masalah utama Kabupaten Berau saat ini, juga merupakan masalah Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

5.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

Ketentuan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, antara lain berisi pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, antara lain:

- 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan

- 3) Pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal. Sementara itu, pemberian kemudahan bentuknya bisa berupa:
 - a) Penyediaan data dan informasi peluang penanam modal;
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
 - d) Pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

Kemudian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengemukakan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan;
- 2) menyerap tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB);
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk alih teknologi;
- 8) melakukan industri pionir;
- 9) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 11) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- 12) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengungkapkan bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- 1) Tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian kemudahan;

- 2) Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- 3) Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- 4) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- 5) Bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- 6) Pengaturan pembinaan dan pengawasan.

5.7. Promosi Penanaman Modal

Promosi dapat diartikan sebagai salah satu mata rantai sistem pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada target market yaitu potential investor, potential buyer dan potential tourist bagi pariwisata, yang dilakukan dalam dan di luar negeri.

Bagi Pemerintah Kabupten Berau, promosi sebagai instrumen pembangunan, pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan pemerintah daerah. Promosi Pemerintah Kabupten Berau, adalah suatu aspek dalam bauran pemasaran, berfungsi sebagai sarana komunikasi dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan investasi dengan target market, yang dalam konteks ini adalah potential investor, potential buyer dan potential tourist bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri. Kegiatan promosi dapat dilaksanakan menggunakan media seperti:

- 1) Memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti website, blog khusus, milis email; dan
- 2) Melalui media promo yang dikemas dalam bentuk CD, film atau media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio.

Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering dilakukan secara langsung melalui:

- 1) Kegiatan pameran (*exhibition*).
- 2) Penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran.
- 3) Kegiatan pengiriman & atau penerimaan misi (dagang, investasi, wisatawan).
- 4) Kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional)

Promosi sebagai instrumen pembangun, yang pelaksanaannya oleh lembaga yang merepresentasikan Pemerintah daerah, adalah berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pemangku kepentingan investasi lainnya sebagai salah satu instrumen pembangunan yang merupakan kebutuhan dari suatu strategi guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Karena itu perencanaan dan pelaksanaannya harus terkoordinasi dengan baik dalam satu manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporannya secara terintegrasi. Pada prinsipnya setiap Perangkat Daerah Kabupaten Berau dapat melaksanakan promosi baik secara media ataupun dengan kegiatan langsung, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Berau, disarankan melalui pengelompokan ke dalam jenis promosi perdagangan; kepariwisataan dan investasi.

Dilihat dari aspek materi/bahan promosi, Pemerintah Kabupten Berau yang akan melaksanakan kegiatan promosi baik yang akan dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, perlu dipersiapkan dengan baik dalam hal:

- 1) Data atau informasi kegiatan promosi yang akan diikuti termasuk data atau informasi Negara tujuan promosi apabila akan dilaksanakan di luar negeri.
- 2) Materi yang menjadi bagian yang sangat penting sebagai prasarat pelaksanaan perlu dikoordinasikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Kabupten Berau.
- 3) Data atau informasi serta bahan promosi yang harus disiapkan dengan baik dalam bentuk hard dan soft copy harus dikemas dengan standar internasional dalam kegiatan promosi seperti informasi tentang objek promosi yang jelas dan ringkas, terdapat hasil analisis ekonomi yang cukup lengkap dan pengelola kegiatan yang di promosikan harus terinformasikan dengan jelas dan terperinci;

- 4) Informasi yang dikemas dalam bahan promosi harus dapat mengidentifikasi keterkaitan antar sektor dengan pendekatan kegiatan promosi berbasis kepada Trade, Tourism, dan Investment.
- 5) Kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran Pemerintah Kabupten Berau dalam keterkaitan dengan Trade-Tourism- Investment.

Arah promosi harus direncanakan sebagai berikut:

- 1) Promosi dalam bidang pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- 2) Promosi dalam bidang pembangunan dan pengembangan ekonomi regional berbasis potensi lokal;
- 3) Promosi dalam bidang penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
- 4) Promosi dalam bidang pembangunan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 5) Promosi dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

BAB VI

INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

6.1. Analisis SWOT

6.1.1. Analisis (*Internal Factos Analysis Summary* (IFAS) dan *Eksternal Faktors Analysis Summary* (EFAS))

Kekuatan (*Strengths*) Kabupaten Berau antara lain berdekatan dengan ibukota Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan. Selain itu, Kabupaten Berau juga merupakan jalur darat utama penghubung antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara yang memiliki posisi di tengah-tengah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur. Sehingga secara geografis letak Kabupaten Berau merupakan daerah yang strategis dalam mengembangkan lahan yang terbuka untuk investasi dibidang sektor pariwisata, kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri, dsb.

Dari penentuan analisis SWOT maka akan dibuat terlebih dahulu Matriks Faktor Strategi Internal (*Internal Strategif Factos Analysis Summary* (IFAS)) dan *Matriks Eksternal Strategic Faktors Analysis Summary* (EFAS) dimana dibuat untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal dan ekstrenal yang telah diidentifikasi ke dalam kerangka *Strengths* (*kekuatan*), *Weaknesses* (*kelemahan*), *Opportunities* (*peluang*), dan *Threats* (*ancaman*) yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Pertanian & Perkebunan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Strengths (kekuatan)			
Permintaan hasil pertanian dan perkebunan terus meningkat	0,15	4	0,60
Produk hasil pertanian digunakan semua kalangan	0,10	3	0,30
Lahan masih banyak tersedia	0,10	3	0,30
Infrastruktur akses jalan sudah terhubung Sebagian	0,05	2	0,15
Ketersediaan SDM cukup memadai (Ketrampilan, Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan)	0,10	3	0,30
Jumlah	0,5		1,65

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Weaknesses (kelemahan)			
Produksi Pertanian Belum Optimal	0,15	4	0,60
Rendahnya Harga jual produk pertanian & perkebunan	0,15	4	0,60
Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian	0,10	3	0,15
Masih merupakan pekerjaan sampingan	0,05	3	0,10
Tidak dikelola secara profesional	0,05	3	0,15
Jumlah	0,5		1,6
Total S + W	1,00	3,2 (Rata-rata)	3,25

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Kekuatan yang besar
- 3 = Kekuatan yang kecil
- 2 = Kelemahan yang kecil
- 1 = Memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan tabel diatas hasil matrik IFAS sektor pertanian & perkebunan menunjukkan score nilai 3,25 diatas nilai rata-ratanya sebesar 3,2 dari keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *strenghts* (kekuatan) sebesar 1,65 lebih besar dibandingkan dengan *weaknesses* (kelemahan) sebesar 1,60 atau lebih besar 0,50

Tabel 6.2. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Pertanian & Perkebunan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi External (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Opportunities (peluang)			
Dukungan potensi Sumber Daya Alam dan Agroklimat yang sesuai	0,15	4	0,60
Terbentuknya kelembagaan/organisasipendukung dan pelaksana kegiatan pertanian	0,05	3	0,15
Peluang pasar komoditi pertanian dan Peternakan	0,10	3	0,30
Partsipasi aktif stakeholder	0,10	4	0,40
Dukungan program Bupati Berau berupaPemberian Bantuan Stimultan (Saprodi dan Alsintan) dalam mewujudkan Sektor Pertanian yang maju berbasis teknologi	0,10	4	0,40
Jumlah	0,5		1,85

Faktor-Faktor Strategi External (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Threats (ancaman)			
Persentase Tenaga Kerja Pertanian terus Menurun	0,15	4	0,60
Kerusakan lingkungan dan Perubahan iklim Global	0,10	3	0,30
Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana masih terbatas	0,10	3	0,30
Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan suku bunga masih relatif tinggi	0,10	4	0,40
Terjadinya ahli fungsi lahan menjadi sektor lahan non pertanian	0,05	4	0,20
Jumlah	0,5		1,80
Total O + T	1,00	3,6 (Rata-rata)	3,65

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Peluang yang besar
- 3 = Peluang yang kecil
- 2 = Ancaman yang kecil
- 1 = Ancaman yang besar

Berdasarkan tabel hasil matrik EFAS sektor pertanian & perkebunan menunjukkan score nilai sebesar 3,65 diatas nilai rata-ratanya sebesar 3,6 dari keseluruhan faktor Eksternalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *opportunities* (peluang) sebesar 1,85 lebih besar dibandingkan dengan *threats* (ancaman) sebesar 1,80, yaitu lebih besar dibanding 0,05.

Tabel 6.3. Analisis Strategi SWOT Sektor Pertanian & Perkebunan Di Kabupaten Berau

EFAS	IFAS	Strength (S) - Permintaan hasil pertanian dan perkebunan terus meningkat - Produk hasil pertanian digunakan semua kalangan - Lahan masih banyak tersedia - infrastruktur akses jalan sudah terhubung sebagian - Ketersediaan SDM cukup memadai (Ketrampilan, Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan)	Weakness (W) - Produksi Pertanian Belum Optimal - Rendahnya Harga jual produk pertanian & perkebunan - Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian & Perkebunan - Masih merupakan pekerjaan sampingan - Tidak dikelola secara professional
	Opportunities (O) - Dukungan potensi Sumber Daya Alam dan Agroklimat yang sesuai - Terbentuknya kelembagaan/ organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan pertanian - Peluang pasar komoditi pertanian dan perkebunan - Partisipasi aktif stakeholder	Strategi SO - Melakukan Peningkatan intensifikasi pertanian dengan Fasilitas penyediaan, penggunaan benih/ bibit unggul, pupuk dan pestisida - Pengembangan penangkaran benih/bibit unggul bersertifikat - Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	Strategi WO - Memberikan pelatihan khusus untuk peningkatan pertanian dan perkebunan sehingga dapat berproduksi lebih optimal dan di kelola secara profesional - Membentuk sebuah komunitas atau lembaga dalam mengatur harga jual produk pertanian & perkebunan - Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan

- Dukungan program Bupati Berau berupa Pemberian - Bantuan Stimultan (Saprodi dan Alsintan) dalam mewujudkan Sektor - Pertanian yang maju berbasis teknologi	(SLPHT) - Peningkatan kapasitas SDM - petani dengan Sosialisasi/ pelatihan teknologi pertanian	penyuluh serta memberikan Fasilitas pengembangan demplot dan sekolah lapang bagi petani
Threats (T) - Persentase Tenaga Kerja Pertanian terus menurun - Kerusakan lingkungan dan Perubahan iklim global - Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana masih terbatas - Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan suku bunga masih relatif tinggi - Terjadinya ahli fungsi lahan menjadi sektor lahan non pertanian	Strategi ST - Memberikan pengetahuan pada masyarakat usia produktif tentang pentingnya Pertanian untuk masa depan dan pentingnya menjaga lingkungan akibat perubahan iklim - Dukungan dan perhatian Penuh dari pemerintah baik dari segi infrastruktur - Membantu memberikan pemahaman pada petani bagaimana mekanisme KUR	Strategi WT - Memberikan pelatihan khusus teknologi pertanian bagi para petani - Meningkatkan kualitas hasil pertanian & perkebunan dengan menanam bibit unggul - Melakukan proses penanaman yang sesuai dengan aturan yang berlaku

Tabel 6.4. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Pertanian & Perkebunan Di Kabupaten Berau

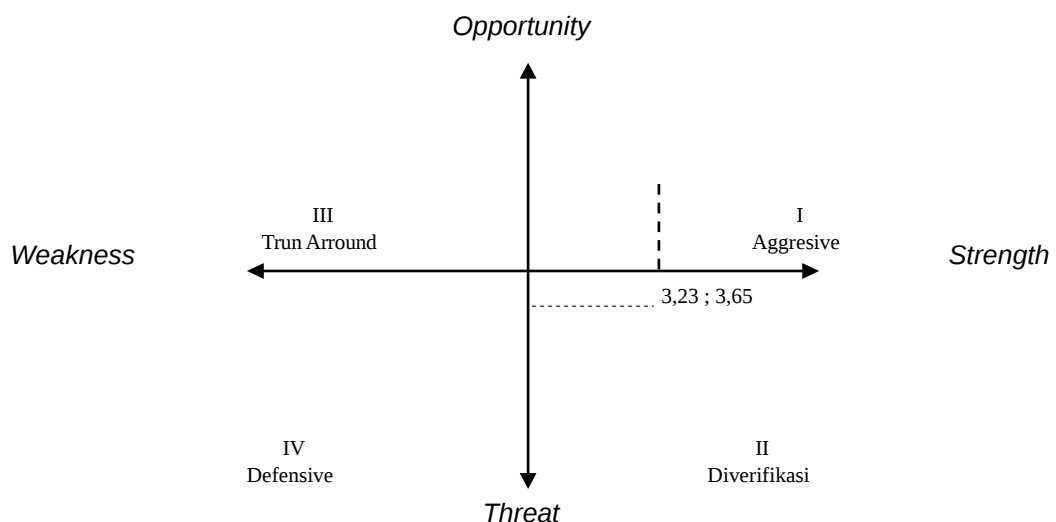
	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
	Strategi SO	Strategi ST
Kekuatan (Strength)	= 1,65 + 1,85	= 1,65 + 1,80
	= 3,50	= 3,45
	Strategi WO	Strategi WT
Kelemahan (Weakness)	= 1,60 + 1,85	= 1,60 + 1,80
	= 3,45	= 3,40

Dari uraian diatas maka dapat diketahui jumlah skor Strategi SO sebesar 3,50 dengan skor Strategi ST sebesar 3,45, Nilai total ini menunjukkan bahwa kekuatan dan ancaman lebih besar pengaruhnya terhadap Sektor Pertanian & Perkebunan sedangkan pada Strategi WO sebesar 3,45 dengan Strategi WT sebesar 3,40 menunjukkan bahwa tingkat kelemahan dan peluang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman yang terjadi pada Sektor Pertanian & Perkebunan di Kabupaten Berau.

Tabel 6.5. Matriks Internal-Eksternal Sektor Pertanian & Perkebunan Di Kabupaten Berau

internal external	Kuat 4,00 – 3,00	Sedang 2,99 – 2,00	Lemah 1,99 – 1,00
Tinggi 4,00 – 3,00	I Internal = 3,25 Eksternal = 3,65	II	II
Sedang 2,99 – 2,00	IV	V	VI
Rendah 2,99 – 2,00	VII	VII	IX

Dari tabel di atas memiliki nilai yang paling tinggi adalah dari faktor eksternal yaitu sebesar 3,65, yang berarti faktor tersebut seperti opportunities dan threat lebih utama dibandingkan dengan faktor internal, dimana faktor internal memiliki nilai 3,25 lebih rendah 0,40 sehingga strategi seperti strength dan weaknes tidak diutamakan.

**Gambar 6.1.** Diagram analisis SWOT Sektor Pertanian & Perkebunan Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar diagram analisis SWOT Sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Berau menunjukkan bahwa Sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Berau berada pada posisi kuadran I yang berarti situasi yang sangat menguntungkan. Sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Berau memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam posisi ini adalah mendukung

pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy). Adapun Sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Berau juga memiliki kelemahan dan ancaman, tetapi dapat memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimiliki untuk berkembang dan bertahan.

Tabel 6.6. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Peternakan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Strengths (kekuatan)			
Bahan pakan yang masih cukup tersedia	0,15	4	0,60
Produk memiliki nilai ekonomis tinggi	0,10	3	0,30
Mudah dalam pemasaran	0,05	3	0,30
Produk memiliki konsumen disemua kalangan	0,05	2	0,10
Tingginya dukungan dari pemerintah	0,15	4	0,60
Jumlah	0,5		1,90
Weaknesses (kelemahan)			
Sistem Pemeliharaan ternak belum optimal	0,15	4	0,60
Pelayanan IB yang belum optimal	0,15	4	0,60
Masih kurangnya penyediaan Pakan Ternak	0,05	3	0,15
Kurangnya pengetahuan bagi pelaku usaha Peternakan	0,05	3	0,15
Kurangnya permodalan bagi pelaku usaha Peternakan	0,10	3	0,30
Jumlah	0,5		1,8
Total S + W	1	3,2 (Rata-rata)	3,7

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Kekuatan yang besar
- 3 = Kekuatan yang kecil
- 2 = Kelemahan yang kecil
- 1 = Memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan tabel diatas hasil matrik IFAS sektor peternakan menunjukkan score nilai 3,4 diatas nilai rata-ratanya sebesar 3,2 dari keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai strenghts (kekuatan) sebesar 1,90 lebih besar dibandingkan dengan weaknesses (Kelemahan) sebesar 1,80 atau lebih besar 0,10.

Tabel 6.7. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Peternakan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Opportunities (peluang)			
Tersedianya IPTEK peternakan tepat guna	0,15	4	0,60
Terbentuknya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan peternakan	0,05	3	0,15
Peluang pasar komoditi peternakan yang tinggi	0,10	3	0,30
Dukungan potensi Sumber Daya Alam	0,10	4	0,40

Faktor-Faktor Strategi External (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Dukungan program Bupati Berau berupa Pemberian Bantuan Stimultan (Sapronak) dalam mewujudkan Sektor Peternakan yang maju berbasis teknologi	0,10	4	0,40
Jumlah	0,5		1,85
Threats (ancaman)			
Penyakit hewan menular strategis masih terjadi dan perlu dikendalikan	0,15	4	0,60
Belum optimalnya pengawasan peredaran bahan pangan asal hewan	0,10	3	0,30
Keterbatasan jumlah petugas dalam satu wilayah kerja	0,10	3	0,30
Kurangnya sarana prasarana pelayanan IB	0,10	4	0,40
Sosialisasi dan pembinaan belum maksimal	0,05	4	0,20
Jumlah	0,5		1,80
Total O + T	1	3,6 (Rata-rata)	3,65

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Peluang yang besar
- 3 = Peluang yang kecil
- 2 = Ancaman yang kecil
- 1 = Ancaman yang besar

Berdasarkan tabel hasil matrik EFAS sektor peternakan menunjukkan score nilai sebesar 3,65 diatas nilai rata-ratanya sebesar 3,6 dari keseluruhan faktor Eksternalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai opportunities (peluang) sebesar 1 , 8 5 lebih besar dibandingkan dengan threats (ancaman) sebesar 1,80, yaitu lebih besar dibanding 0,05

Tabel 6.8. Analisis Strategi SWOT Sektor Peternakan Kabupaten Berau

IFAS	Strength (S)	Weakness (W)
EFAS - Bahan pakan yang masih cukup tersedia - Produk memiliki nilai ekonomis tinggi - Mudah dalam pemasaran - Produk memiliki konsumen disemua kalangan - Tingginya dukungan dari pemerintah	- Sistem Pemeliharaan ternak belum optimal - Pelayanan IB yang belum optimal - Masih kurangnya penyediaan Pakan Ternak - Kurangnya pengetahuan bagi pelaku usaha peternakan - Kurangnya permodalan bagi pelaku usaha peternakan	
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
- Tersedianya IPTEK peternakan tepat guna - Terbentuknya kelembagaan/ organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan peternakan - Peluang pasar komoditi peternakan yang tinggi - Dukungan potensi Sumber Daya Alam - Dukungan program Bupati Berau berupa Pemberian Bantuan Stimultan (Sapronak) dalam mewujudkan Sektor - Peternakan yang maju berbasis teknologi	- Membuat pengolahan Bahan pakan ternak dengan IPTEK Tepat guna - Membentuk lembaga yang mengatur jalannya distribusi kegiatan peternakan - Memberikan akses kemudahan untuk memasarkan produk peternakan - Memperbanyak jumlah populasi ternak sapi potong - Menjaga hubungan baik dengan peternak dan stekholder	- Meningkatkan perawatan terhadap ternak - Memberikan pelayanan IB dengan maksimal - Memberikan bantuan berupa pakan ternak - Memberikan pelatihan tentang pengetahuan perternakan dengan IPTEK tepat guna - Membantu dalam memberikan akses bantuan permodalan untuk usaha peternakan

Threats (T) • Penyakit hewan menular strategis masih terjadi dan perlu dikendalikan • Belum optimalnya pengawasan peredaran bahan pangan asal hewan • Keterbatasan jumlah petugas dalam satu wilayah kerja • Kurangnya sarana prasarana pelayanan IB • Sosialisasi dan pembinaan belum maksimal	Strategi ST • Membantu mengatasi penyakit hewan menular dengan cara memberikan bantuan vaksin yang teratur • Memberikan pengawasan yang optimal terhadap Bahan pangan untuk hewan ternak • Menghidupkan kembali penyuluhan pada masyarakat dengan meningkatkan jumlah pegawai penyuluh hewan ternak • Memberikan bantuan berupa sarana prasarana pelayanan IB • Selalu memberikan sosialisasi dan pembinaan pada para peternak hewan.	Strategi WT • Memberikan pelatihan penaggulana nmasalah penyakit hewan menular • Memberikan bantuan subsidi pangan hewan ternak • Memberikan insentif kepada para penyuluh hewan ternak • Memberikan pelatihan bagaimana melakukan IB • Memanfaatkan animo masyarakat dengan membuat daerah sentral penghasil ternak hewan
--	--	---

Tabel 6.9. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Peternakan Di Kabupaten Berau

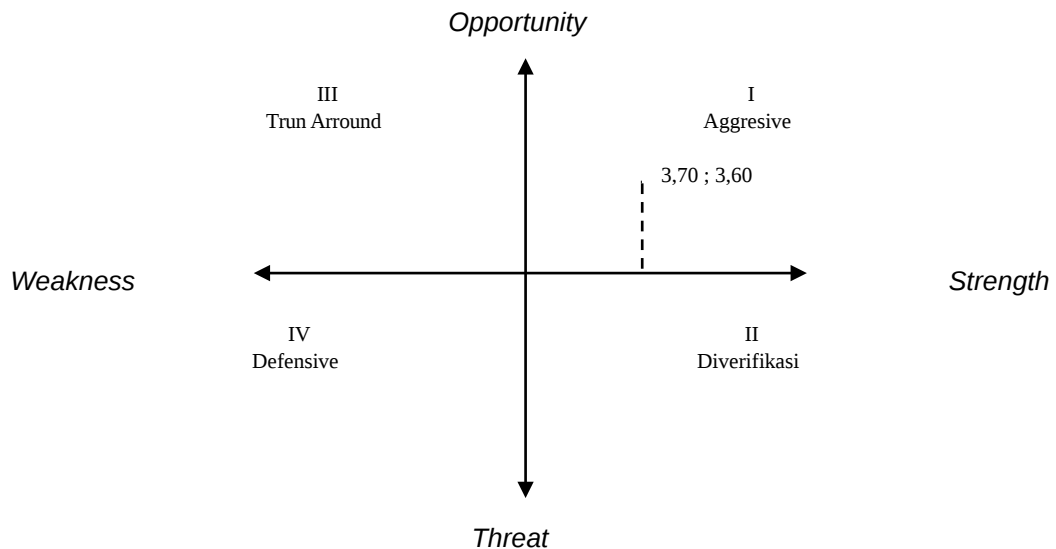
	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
Kekuatan (Strength)	Strategi SO $= 1,90 + 1,85$ $= 3,75$	Strategi ST $= 1,90 + 1,80$ $= 3,70$
Kelemahan (Weakness)	Strategi WO $= 1,80 + 1,85$ $= 3,65$	Strategi WT $= 1,80 + 1,80$ $= 3,60$

Dari tabel di atas maka dapat diketahui jumlah skor Strategi SO sebesar 3,75 dengan skor Strategi ST sebesar 3,70, Nilai total ini menunjukkan bahwa kekuatan dan ancaman lebih besar pengaruhnya terhadap sektor peternakan sedangkan pada Strategi WO sebesar 3,65 dengan Strategi WT sebesar 3,60 menunjukkan bahwa tingkat kelemahan dan peluang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman yang terjadi pada sektor peternakan di Kabupaten Berau.

Tabel 6.10. Matriks Internal-Eksternal Sektor Peternakan Di Kabupaten Berau

Internal \ External	Kuat 4,00 – 3,00	Sedang 2,99 – 2,00	Lemah 1,99 – 1,00
Tinggi 4,00 – 3,00	I Internal = 3,70 Eksternal = 3,60	II	II
Sedang 2,99 – 2,00	IV	V	VI
Rendah 2,99 – 2,00	VII	VII	IX

Dari tabel di atas memiliki nilai yang paling tinggi adalah dari faktor internal yaitu sebesar 3,70 dimana yang berarti faktor tersebut seperti *strength* dan *weaknes* lebih utama dibandingkan dengan faktor eksternal, dimana faktor eksternal memiliki nilai 3,60 lebih rendah 0,10 sehingga strategi seperti *Opportunity* dan *Threat* tidak diutamakan.



Gambar 6.2. Diagram analisis SWOT Sektor Peternakan Di Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar diagram analisis SWOT Sektor peternakan Kabupaten Berau menunjukkan berada pada posisi kuadran I yang berarti situasi yang sangat menguntungkan. Sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Berau memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam posisi ini adalah mendukung pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy). Adapun peternakan Kabupaten Berau juga memiliki kelemahan dan ancaman, tetapi dapat memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimiliki untuk berkembang dan bertahan.

Tabel 6.11. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Perikanan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Strengths (kekuatan)			
Potensi sumber daya alam, yakni luas laut yang dapat mendukung pengembangan sub sector perikanan yang ada	0,15	4	0,60

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang perikanan	0,10	3	0,30
Potensi Laut untuk pengembangan Usaha dalam subsektor Perikanan	0,15	4	0,60
Meningkatkan pengolahan sumber daya alam pada subsektor perikanan	0,05	2	0,10
Kebijakan Pemerintah, mengenai pengembangan subsektor perikanan	0,10	3	0,30
Jumlah	0,55		1,90
Weaknesses (kelemahan)			
Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih Rendah	0,15	4	0,60
Kurang adanya pemahaman yang baik tentang Teknologi	0,15	4	0,60
Ketersediaan sarana dan prasarana	0,05	2	0,15
Kurang adanya penyuluhan dari para petugas Lapangan	0,05	2	0,15
Kurangnya dukungan dari lembaga informal maupun formal	0,05	2	0,15
Jumlah	0,45		1,65
Total S+W	1	3 (Rata-rata)	3,55

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Kekuatan yang besar
- 3 = Kekuatan yang kecil
- 2 = Kelemahan yang kecil
- 1 = Memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan tabel di atas hasil matrik IFAS sektor perikanan menunjukkan score nilai 3,55 diatas nilai rata-ratanya sebesar 3 dari keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *strenghts* (kekuatan) sebesar 1,90 lebih besar dibandingkan dengan *weaknesses* (Kelemahan) sebesar 1,65 atau lebih besar 0,25

Tabel 6.12. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Perikanan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi External (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Opportunities (peluang)			
Ada dukungan dan perhatian dari pemerintah atau instansi terkait	0,15	4	0,60
Kebijakan nasional untuk pengembangan kegiatan bisnis kelautan	0,10	3	0,15
Potensi pasar, komoditi ikan dari berbagai jenis yang dihasilkan dari penangkapan maupun budidaya memiliki pasar ekspor	0,10	4	0,60

Faktor-Faktor Strategi External (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Sudah tersedia sentra industri (kelembagaan) UMKM Pengolahan Produk Turunan	0,05	2	0,15
Ada bantuan dalam bentuk peralatan dan tenaga ahli dari Pemda dan Swasta	0,10	4	0,40
Jumlah	0,5		1,9
Threats (ancaman)			
Kondisi alam yang tidak menentu	0,15	4	0,60
Persaingan produk sudah berada pada tingkat Kabupaten dan diluar Kabupaten	0,10	3	0,15
Promosi masih berada di tingkat Kabupaten	0,10	3	0,30
Pencurian, Pengeboman, Penggunaan Racun (Potasium) masih tinggi	0,10	4	0,60
Harga produk tidak stabil	0,05	2	0,20
Jumlah	0,5		1,85
Total O + T	1	3,4 (Rata-rata)	3,75

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Peluang yang besar
- 3 = Peluang yang kecil
- 2 = Ancaman yang kecil
- 1 = Ancaman yang besar

Berdasarkan tabel hasil matrik EFAS sektor perikanan menunjukkan score nilai sebesar 3,75 diatas nilai rata-ratanya sebesar 3,4 dari keseluruhan faktor Eksternalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai opportunities (peluang) sebesar 1,90 lebih besar dibandingkan dengan threats (ancaman) sebesar 1,85, yaitu lebih besar dibanding 0,05.

Tabel 6.13. Analisis Strategi SWOT Sektor Perikanan Kabupaten Berau

IFAS	EFAS	
	Strength (S)	Weakness (W)
	- Potensi sumber daya alam, yakni luas laut yang dapat mendukung pengembangan sub sektor perikanan yang ada - Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang perikanan - Potensi Laut untuk pengembangan Usaha dalam subsektor Perikanan - Meningkatkan pengolahan sumber daya alam pada subsektor perikanan - Banyaknya kebijakan Pemerintah mengenai pengembangan subsektor perikanan	- Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah - Kurang adanya pemahaman yang baik tentang teknologi perikanan - Ketersediaan sarana dan prasarana masih kurang dalam peningkatan hasil perikanan - Kurang adanya penyuluhan dari para petugas lapangan - Kurangnya dukungan dari lembaga informal maupun formal

Opportunities (O) • Ada dukungan dan perhatian dari pemerintah atau instansi terkait • Kebijakan nasional untuk pengembangan kegiatan bisnis kelautan • Potensi pasar, komoditi ikan dari berbagai jenis yang dihasilkan dari penangkapan maupun budidaya memiliki pasar ekspor • Sudah tersedia sentra industri (kelembagaan) UMKM Pengolahan Produk Turunan • Ada bantuan dalam bentuk peralatan dan tenaga ahli dari Pemda dan Swasta	Strategi SO • Pengembangan teknologi penangkapan berbasis IPTEK • Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan • Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan • Pengembangan teknologi penangkapan • Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan	Strategi WO • Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap • Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM nelayan • Penyusunan mekanisme kredit pinjaman yang tepat dan aman untuk nelayan kecil • Penciptaan sistem investasi usaha perikanan tangkap yang menarik dan kondusif • Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan
Threats (T) • Kondisi alam yang tidak menentu • Persaingan produk sudah berada pada tingkat Kabupaten dan diluar Kabupaten • Promosi masih berada di tingkat Kabupaten • Pencurian, Pengeboman, Penggunaan Racun (Potasium) masih tinggi • Harga produk tidak stabil	Strategi ST • Peningkatan sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan berbasis masyarakat • Pengembangan sistem logistik penyediaan bahan bakar minyak • Penyiapan dan peningkatan kualitas SDM pengawas lingkungan perairan.	Strategi WT • Peningkatan penegakan hukum secara tegas • Peningkatan kerjasama usaha penangkapan ikan melalui program kemitraan • Peningkatan kesadaran masyarakat pesisir terhadap kelestarian lingkungannya.

Tabel 6.14. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Perikanan Di Kabupaten Berau

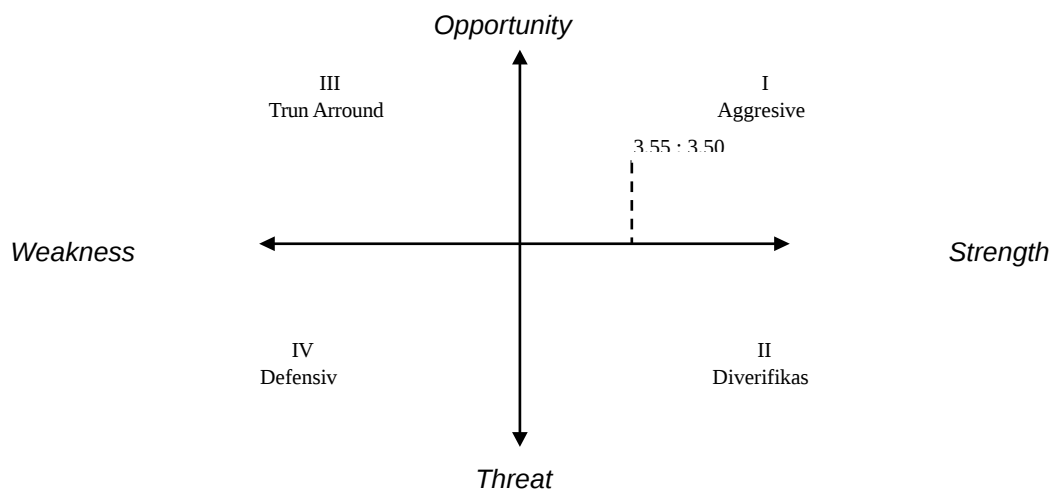
	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
Kekuatan (Strength)	Strategi SO $= 1,90 + 1,90$ $= 3,80$	Strategi ST $= 1,90 + 1,85$ $= 3,75$
Kelemahan (Weakness)	Strategi WO $= 1,65 + 1,90$ $= 3,55$	Strategi WT $= 1,65 + 1,85$ $= 3,50$

Dari uraian diatas maka dapat diketahui jumlah skor Strategi SO sebesar 3,80 dengan skor Strategi ST sebesar 3,75, Nilai total ini menunjukkan bahwa kekuatan dan ancaman lebih besar pengaruhnya terhadap sektor perikanan sedangkan pada Strategi WO sebesar 3,55 dengan Strategi WT sebesar 3,50 menunjukkan bahwa tingkat kelemahan dan peluang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman yang terjadi pada sektor perikanan di Kabupaten Berau.

Tabel 6.15. Matriks Internal-Eksternal Sektor Perikanan Di Kabupaten Berau

Internal External	Kuat 4,00– 3,00	Sedang 2,99 – 2,00	Lemah 1,99 – 1,00
	I Internal = 3,55 Eksternal = 3,50	II	II
Tinggi 4,00 – 3,00			
Sedang 2,99 – 2,00	IV	V	VI
Rendah 2,99 – 2,00	VII	VII	IX

Dari tabel di atas memiliki nilai yang paling tinggi adalah dari faktor internal yaitu sebesar 3,55 dimana yang berarti faktor tersebut seperti *strength* dan *weaknes* lebih utama dibandingkan dengan faktor eksternal, dimana faktor eksternal memiliki nilai 3,50 lebih rendah 0,05 sehingga strategi seperti *Opportunity* dan *Threat* tidak diutamakan.

**Gambar 6.3.** Diagram analisis SWOT Sektor Perikanan Di Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar diagram analisis SWOT Sektor perikanan Kabupaten Berau menunjukkan berada pada posisi kuadran I yang berarti situasi yang sangat menguntungkan. Sektor perikanan Kabupaten Berau memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam posisi ini adalah mendukung pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*). Adapun perikanan Kabupaten Berau juga memiliki kelemahan dan ancaman, tetapi dapat memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimiliki untuk berkembang

dan bertahan.

Tabel 6.16. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Kehutanan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Strengths (kekuatan)			
Perda dan beberapa keputusan bupati tentang pengelolaan hutan rakyat yang dalam pengurusanya cukup mudah sehingga memudahkan pelaksanaan PHBM	0,10	3	0,30
Produk memiliki nilai ekonomis tinggi	0,10	3	0,30
Produk memiliki kekhasan tersendiri	0,05	2	0,15
Produk memiliki konsumen khusus	0,05	2	0,10
Ketersediaan SDM cukup banyak (Ketrampilan, Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan)	0,10	3	0,30
Jumlah	0,4		1,15
Weaknesses (kelemahan)			
Usaha di bidang kehutanan perlu modal besar, lokasi yang tepat, ketrampilan dan aturan birokrasi	0,15	4	0,60
Sulit pengawasan terhadap pelaku kerusakan hutan	0,15	4	0,60
Pengembangan produk membutuhkan biaya yang sangat besar	0,15	3	0,30
Sulitnya pengamanan dan distribusi hasil hutan	0,05	3	0,15
Tidak dikelola secara professional	0,10	3	0,30
Jumlah	0,6		1,95
Total S+W	1	3 (Rata-rata)	3,1

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Kekuatan yang besar
- 3 = Kekuatan yang kecil
- 2 = Kelemahan yang kecil
- 1 = Memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan tabel di atas hasil matrik IFAS sektor kehutanan menunjukkan score nilai 3,10 diatas nilai rata-ratanya sebesar 3 dari keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *strenghts* (kekuatan) sebesar 1,15 lebih kecil dibandingkan dengan *weaknesses* (Kelemahan) sebesar 1,95.

Tabel 6.17. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Kehutanan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Opportunities (peluang)			
Ada dukungan dan perhatian dari pemerintah atau instansi terkait	0,15	3	0,30
Tingkat permintaan produk sudah berada pada tingkat Nasional	0,05	4	0,60
Akses (jalan, transportasi, informasi) ada kemudahan	0,10	2	0,15
Sudah tersedia sentra industri (kelembagaan)	0,10	2	0,15
Ada bantuan dalam bentuk peralatan dan tenaga ahli dari Pemerintah dan Swasta	0,10	2	0,15
Jumlah	0,5		1,35
Threats (ancaman)			
Perencanaan sebagai langkah awal (<i>starting point</i>) yang kurang terintegrasi	0,15	4	0,60
Tingkat partisipasi masyarakat masih kurang (Perencanaan, Pengawasan, dan Pemantauan)	0,10	3	0,30
Kebakaran Hutan di musim kemarau	0,10	3	0,30
Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah dalam mengelola hasil hutan	0,10	4	0,40
Tingginya tingkat pencurian kayu hutan (tidak berijin)	0,05	4	0,20
Jumlah	0,5		1,80
Total O+T	1	3,1	3,15

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Peluang yang besar
- 3 = Peluang yang kecil
- 2 = Ancaman yang kecil
- 1 = Ancaman yang besar

Berdasarkan tabel hasil matrik EFAS sektor kehutanan menunjukkan score nilai sebesar 3,15, di atas nilai rata-ratanya sebesar 3,10 dari keseluruhan faktor eksternalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *opportunities* (peluang) sebesar 1,35 lebih kecil dibandingkan dengan *threats* (ancaman) sebesar 1,80 atau sebesar 0,45

Tabel 6.18. Tabel Analisis Strategi SWOT Sektor Kehutanan Kabupaten Berau

IFAS EFAS	Strength (S) • Perda dan beberapa keputusan bupati tentang pengelolaan hutan rakyat yang dalam pengurusannya cukup mudah sehingga memudahkan pelaksanaan PHBM • Produk memiliki nilai ekonomis tinggi • Produk memiliki kekhasan tersendiri • Produk memiliki konsumen khusus • Ketersediaan SDM cukup banyak (Ketrampilan, Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan)	Weakness (W) • Usaha di bidang kehutanan perlu modal besar, lokasi yang tepat, ketrampilan dan aturan birokrasi • Sulit pengawasan terhadap pelaku kerusakan hutan • Pengembangan produk membutuhkan biaya yang sangat besar • Sulitnya pengamanan dan distribusi hasil hutan • Tidak dikelola secara profesional
Opportunities (O) • Ada dukungan dan perhatian dari pemerintah atau instansi terkait • Tingkat permintaan produk sudah berada pada tingkat Nasional • Akses (jalan, transportasi, informasi) ada kemudahan • Sudah tersedia sentra industri (kelembagaan) • Ada bantuan dalam bentuk peralatan dan tenaga ahli dari pemerintah dan swasta	Strategi SO • Membuat perda yang membantu mempermudah pengelolaan hutan • Meningkatkan kualitas produk hasil kayu dengan sesuai standar nasional • Memperbaiki infrastruktur jalan	Strategi WO • Memberikan bantuan permodalan dengan bantuan kredit Lunak buat Masyarakat • Menghidupkan kembali polisi hutan dengan memperbanyak jumlahnya • Membuat kelompok Masyarakat tentang perlindungan hasil hutan
Threats (T) • Perencanaan sebagai langkah awal (starting point) yang kurang terintegrasi • Tingkat partisipasi masyarakat masih kurang (Perencanaan, Pengawasan, dan Pemantauan) • Kebakaran Hutan di musim kemarau • Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah dalam mengelola hasil hutan • Tingginya tingkat pencurian kayu hutan (tidak berijin)	Strategi ST • Memberikan pelatihan tentang bagaimana (Perencanaan, Pengawasan, dan Pemantauan) hutan • Memberikan hukuman yang berat terhadap pencurian hasil hutan	Strategi WT • Peningkatan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku perusakan hutan • Peningkatan kerjasama usaha pengelolaan hasil hutan melalui program kemitraan • Peningkatan kesadaran masyarakat di daerah terhadap kelestarian hutan .

Tabel 6.19. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Kehutanan Di Kabupaten Berau

	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
Kekuatan (Strength)	Strategi SO = 1,15 + 1,35 = 2,50	Strategi ST = 1,15 + 1,80 = 2,95
Kelemahan (Weakness)	Strategi WO = 1,95 + 1,35 = 3,30	Strategi WT = 1,95 + 1,80 = 3,75

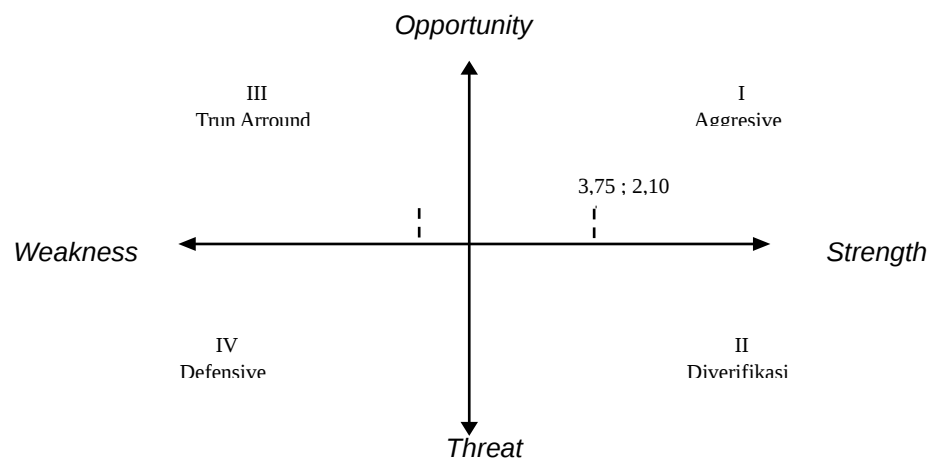
Dari tabel di atas maka dapat diketahui jumlah skor Strategi SO sebesar 2,50 dengan skor Strategi ST sebesar 2,95, Nilai total ini menunjukkan bahwa kekuatan dan ancaman lebih rendah pengaruhnya terhadap sektor kehutanan sedangkan pada Strategi WO sebesar 3,55

dengan Strategi WT sebesar 3,50 menunjukkan bahwa tingkat kelemahan dan peluang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman yang terjadi padasektor kehutanan di Kabupaten Berau.

Tabel 6.20. Matriks Internal-Eksternal Sektor Kehutanan Di Kabupaten Berau

External \ Internal	Internal		
	Kuat 4,00 – 3,00	Sedang 2,99 – 2,00	Lemah 1,99 – 1,00
Tinggi 4,00 – 3,00	I Eksternal = 3,75	II	II
Sedang 2,99 – 2,00	IV	V Internal = 2,10	VI
Rendah 2,99 – 2,00	VII	VII	IX

Dari tabel di atas memiliki nilai yang paling tinggi adalah dari faktor eksternal yaitu sebesar 3,75, yang berarti faktor tersebut seperti *Opportunity* dan *Threat* lebih utama dibandingkan dengan faktor eksternal, dimana faktor eksternal memiliki nilai 3,50 lebih rendah 0,05 sehingga strategi seperti *strength* dan *weaknes* tidak diutamakan.



Gambar 6.4. Diagram analisis SWOT Sektor Kehutanan Di Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar diagram analisis SWOT Sektor kehutanan Kabupaten Berau menunjukkan berada pada posisi kuadran I dan IV yang berarti situasi yang tidak terlalu menguntungkan dan perlu adanya kehati-hatian. Sektor kehutanan Kabupaten Berau memiliki kelemahan yang cukup tinggi sehingga harus dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang

harus diterapkan dalam posisi ini adalah mengurangi tingkat ancaman dan kelemahan yang masih cukup tinggi dengan cara meningkatkan kemampuan SDM, Peningkatan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku perusakan hutan, Peningkatan kerjasama usaha pengelolaan hasil hutan melalui program kemitraan serta peningkatan kesadaran masyarakat di daerah terhadap kelestarian hasil hutan.

Tabel 6.21. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Pertambangan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Strengths (kekuatan)			
Sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang dimiliki sangat besar	0,15	4	0,60
Produk memiliki nilai ekonomis tinggi	0,10	3	0,30
Pertumbuhan ekonomi yang stabil	0,05	3	0,30
Iklim investasi yang kondusif	0,05	3	0,30
Perkembangan teknologi yang dimiliki	0,10	4	0,60
Jumlah	0,45		2,10
Weaknesses (kelemahan)			
Adanya krisis moneter dan resesi multi dimensi yang bisa terjadi setiap saat	0,15	4	0,60
kompetensi SDM lokal yang lemah	0,10	3	0,30
Harga mineral dan batubara yang tidak menentu di pasar global	0,15	3	0,30
Lemahnya tingkat kemanan	0,10	3	0,30
Lemahnya birokrasi perijinan yang berbelit-belit dan banyaknya pungutan liar (Oknum tertentu).	0,05	2	0,15
Jumlah	0,55		1,65
Total S+W	1	3,2 (Rata-rata)	3,75

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Kekuatan yang besar
- 3 = Kekuatan yang kecil
- 2 = Kelemahan yang kecil
- 1 = Memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan tabel di atas hasil matrik IFAS sektor pertambangan menunjukkan score nilai 3,75, di atas nilai rata-ratanya sebesar 3,2 dari keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *strenghts* (kekuatan) sebesar 2,10 lebih besar dibandingkan dengan *weaknesses* (Kelemahan) sebesar 1,65.

Tabel 6.22. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Pertambangan Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi External (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Opportunities (peluang)			
Sumber utama peningkatan Pertumbuhan ekonomi tingkat daerah maupun nasional	0,15	3	0,45
Adanya pertumbuhan eksternalitas yang menguntungkan seperti peralihan pengetahuan dan Teknologi	0,15	4	0,60
Akses ke teknologi yang lebih baik atau barang-barang modal dan perantara dengan teknologi maju.	0,10	4	0,40
Peluang yang besar untuk tenaga kerja (SDM) lokal yang berkualitas dan profesional	0,10	3	0,30
Peluang yang besar untuk investasi domestik dan asing terutama terhadap produk unggulan.	0,05	3	0,15
Jumlah	0,55		1,9
Threats (ancaman)			
Bisa Terjadi kekurangan ketersediaan produk hasil pertambangan karena termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui	0,15	4	0,60
Kualitas sumber daya manusia (SDM) masih relatif Rendah	0,05	3	0,15
Adanya krisis moneter dan resesi multi dimensi yang bisa terjadi setiap saat	0,10	4	0,40
Harga mineral dan batubara yang tidak menentu di pasar global	0,05	3	0,15
Isu lingkungan yang beranggapan bahwa kegiatan penambangan selalu merusak dan merugikan Lingkungan	0,10	4	0,40
Jumlah	0,45	3,5	1,7
Total O + T	1	3,5 (Rata-rata)	3,6

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Peluang yang besar
- 3 = Peluang yang kecil
- 2 = Ancaman yang kecil
- 1 = Ancaman yang besar

Berdasarkan tabel hasil matrik EFAS sektor pertambangan menunjukkan score nilai sebesar 3,6 diatas nilai rata-ratanya sebesar 3,5 dari keseluruhan faktor eksternalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *opportunities* (peluang) sebesar 1,90 lebih kecil dibandingkan dengan *threats* (ancaman) sebesar 1,70 atau sebesar 0,20.

Tabel 6.23. Analisis Strategi SWOT Sektor Pertambangan Kabupaten Berau

IFAS EFAS	Strength (S)	Weakness (W)
	- Sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang dimiliki sangat besar - Produk memiliki nilai ekonomis tinggi - Pertumbuhan ekonomi yang stabil - Iklim investasi yang kondusif - Perkembangan teknologi yang dimiliki	- Adanya krisis moneter dan resesi multi dimensi yang bisa terjadi setiap saat - kompetensi SDM lokal yang lemah - Harga mineral dan batubara yang tidak menentu di pasar global - Lemahnya tingkat kemandirian - Lemahnya birokrasi perijinan yang berbelit-belit dan banyaknya pungutan liar (Oknum tertentu).
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
- Sumber utama peningkatan Pertumbuhan ekonomi tingkat daerah maupun nasional - Adanya pertumbuhan eksterna-litas yang menguntungkan seperti peralihan pengetahuan dan teknologi - Akses ke teknologi yang lebih baik / barang-barang modal & perantara dengan teknologi maju. - Peluang yang besar untuk tenaga kerja (SDM) lokal yang berkualitas dan profesional - Peluang yang besar untuk investasi domestik dan asing terutama terhadap produk unggulan.	- Memberdayakan SDM agar berkualitas dan profesional - Penggunaan teknologi yang lebih modern agar menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi (Peningkatan Nilai Tambah) - Mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk alokasi sumber daya produksi yang lebih besar (modal, SDM dan mesin). - Mendayagunakan peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung kemajuan pengembangan pertambangan untuk memperbesar pasar ekspor	- Meningkatkan kompetensi SDM - Meningkatkan kualitas produk tambang - Meningkatkan kerjasama lintas sektoral juga kerja sama dengan Litbang agar bisa menghasilkan produk tambang yang berkualitas - Meningkatkan kemampuan SDM dan Komunikasi bahasa asing dan Information technology (IT) - Meningkatkan kualitas pendidikan (input, proses dan Output) agar bisa terhindar dari isu lingkungan yang makin gencar saat ini.
Threats (T)	Strategi ST	Strategi WT
- Bisa Terjadi kekurangan ketersediaan produk hasil pertambangan karena termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui - Kualitas sumber daya manusia (SDM) masih relatif rendah - Adanya krisis moneter dan resesi multi dimensi yang bisa terjadi setiap saat - Harga mineral dan batubara yang tidak menentu di pasar global - Isu lingkungan yang beranggapan bahwa kegiatan penambangan selalu merusak dan merugikan lingkungan	- Membangun infrastruktur untuk mendukung kemajuan sektor pertambangan. - Membangun pusat-pusat energi listrik di wilayah yang kaya akan sumber daya - Mengatasi kelangkaan sumber daya dan cadangan di masa depan dan mengatasi lemahnya pengelolaan sumber daya dan cadangan - Meningkatkan kemampuan birokrasi dan SDM di bidang pertambangan untuk meraih peluang investasi, peluang ekspor SDM dan peluang peningkatan kesejahteraan.	- Menyiapkan sarana prasarana agar sektor pertambangan mampu meningkatkan keuntungan dan mampu menghadapi ancaman persaingan - Mengatasi kelangkaan sumber daya dan cadangan di masa depan untuk menghadapi ancaman kekurangan bahan baku dan keberlanjutan usaha di sektor pertambangan. - Mengatasi lemahnya penerapan otonomi daerah melalui penerapan penegakan hukum yang lebih ketat - Mengatasi lemahnya manajemen SDM melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) - Konsistensi dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan sehingga memberikan kondisi yang kondusif bagi para pengusaha

Tabel 6.24. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Pertambangan Di Kabupaten Berau

	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
	Strategi SO	Strategi ST
Kekuatan (Strength)	$= 2,10 + 1,90$	$= 2,10 + 1,70$
	$= 4,00$	$= 3,80$
	Strategi WO	Strategi WT
Kelemahan (Weakness)	$= 1,65 + 1,90$	$= 1,65 + 1,70$
	$= 3,55$	$= 3,35$

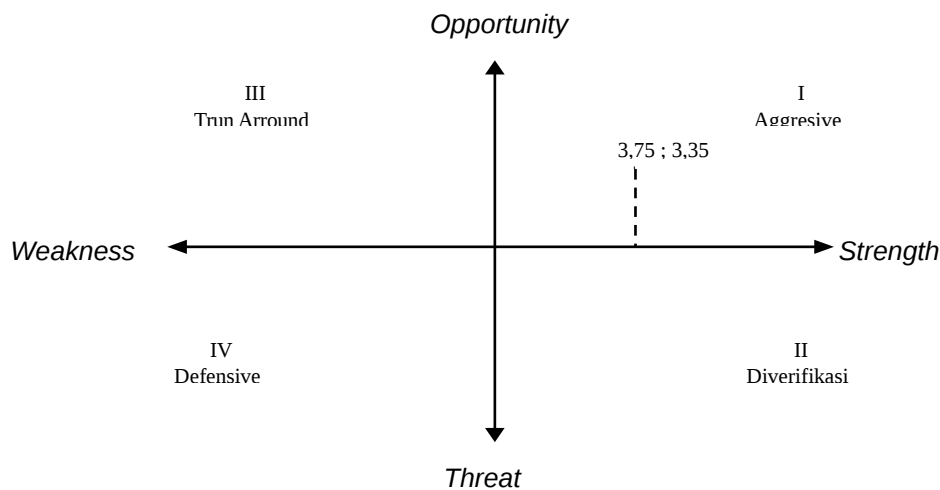
Dari tabel di atas maka dapat diketahui jumlah skor Strategi SO sebesar 4,00 dengan skor Strategi ST sebesar 3,80, Nilai total ini

menunjukkan bahwa kekuatan dan ancaman lebih besar pengaruhnya terhadap sektor pertambangan sedangkan pada Strategi WO sebesar 3,55 dengan Strategi WT sebesar 3,35 menunjukkan bahwa tingkat kelemahan dan peluang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman yang terjadi pada sektor pertambangan di Kabupaten Berau.

Tabel 6.25. Matriks Internal-Eksternal Sektor Pertambangan Di Kabupaten Berau

Internal external	Kuat 4,00 – 3,00	Sedang 2,99 – 2,00	Lemah 1,99 – 1,00
Tinggi 4,00 – 3,00	I Internal = 3,75 Eksternal = 3,35	II	II
Sedang 2,99 – 2,00	IV	V	VI
Rendah 2,99 – 2,00	VII	VII	IX

Dari tabel di atas memiliki nilai yang paling tinggi adalah dari faktor internal yaitu sebesar 3,75, yang berarti faktor tersebut seperti *strength* dan *weaknes* lebih utama dibandingkan dengan faktor eksternal, yang memiliki nilai 3,35 lebih rendah 0,40 sehingga strategi seperti *Opportunity* dan *Threat* tidak diutamakan.



Gambar 6.5. Diagram analisis SWOT Sektor Pertambangan Di Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar diagram analisis SWOT Sektor pertambangan Kabupaten Berau menunjukkan berada pada posisi kuadran I yang berarti

situasi yang sangat menguntungkan. Sektor pertambangan Kabupaten Berau memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam posisi ini adalah mendukung pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*). Adapun pertambangan Kabupaten Berau juga memiliki kelemahan dan ancaman, tetapi dapat memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimiliki untuk berkembang dan bertahan.

Tabel 6.26. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor UMKM & Koperasi Di Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Strengths (kekuatan)			
Adanya dukungan kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah	0,15	4	0,60
Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang	0,10	4	0,60
Tersedianya sumber daya alam yang potensial	0,05	4	0,60
Terjalinnnya kerjasama antar Kabupaten dan Kota	0,05	3	0,15
Adanya semangat dan komitmen Masyarakat untuk membangun usaha	0,10	4	0,30
Jumlah	0,45		2,25
Weaknesses (kelemahan)			
Belum tersedianya data valid dan akurat jumlah UMKM	0,15	4	0,40
Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)	0,10	4	0,40
Belum tersedianya Gedung Balai Latihan Koperasi dan Pusat Promosi KUMKM	0,15	4	0,40
Sebagian besar usaha bersifat non formal dan berskala Mikro, Diversifikasi produknya masih terbatas	0,10	3	0,15
Potensi sumber daya di Kabupaten Berau belum Dimanfaatkan secara optimal	0,05	3	0,15
Jumlah	0,55		1,5
Total S + W	1	3,7 (Rata-rata)	3,75

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Kekuatan yang besar
- 3 = Kekuatan yang kecil
- 2 = Kelemahan yang kecil
- 1 = Memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan tabel di atas hasil matrik IFAS sektor UMKM & Koperasi menunjukkan score nilai 3,75, diatas nilai rata-ratanya sebesar 3,7 dari

keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *strenghts* (kekuatan) sebesar 2,25 lebih besar dibandingkan dengan *weaknesses* (Kelemahan) sebesar 1,50

Tabel 6.27. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor UMKM dan Koperasi Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi External (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Opportunities (peluang)			
Pasar dalam dan luar negeri terbuka bagi produk UMKM & Koperasi	0,15	4	0,60
Tersedianya akses Informasi dan teknologi	0,15	4	0,60
Geografis Kabupaten Berau yang Strategis	0,10	4	0,40
Kabupaten Berau merupakan salah satu Destinasi wisata Nasional	0,10	3	0,30
Mayoritas Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,05	3	0,15
Jumlah	0,55		2,05
Threats (ancaman)			
Persaingan yang semakin ketat bagi Pelaku Usaha (UMKM) Dan Koperasi.	0,15	4	0,60
Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi Standar mutu baik Nasional maupun Internasional.	0,05	3	0,15
Kondisi ekonomi yang fluktuatif	0,10	4	0,40
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	0,05	3	0,15
Rendahnya kualitas SDM	0,10	3	0,15
Jumlah	0,45		1,45
Total O + T	1	3,5 (Rata-rata)	3,5

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Peluang yang besar
- 3 = Peluang yang kecil
- 2 = Ancaman yang kecil
- 1 = Ancaman yang besar

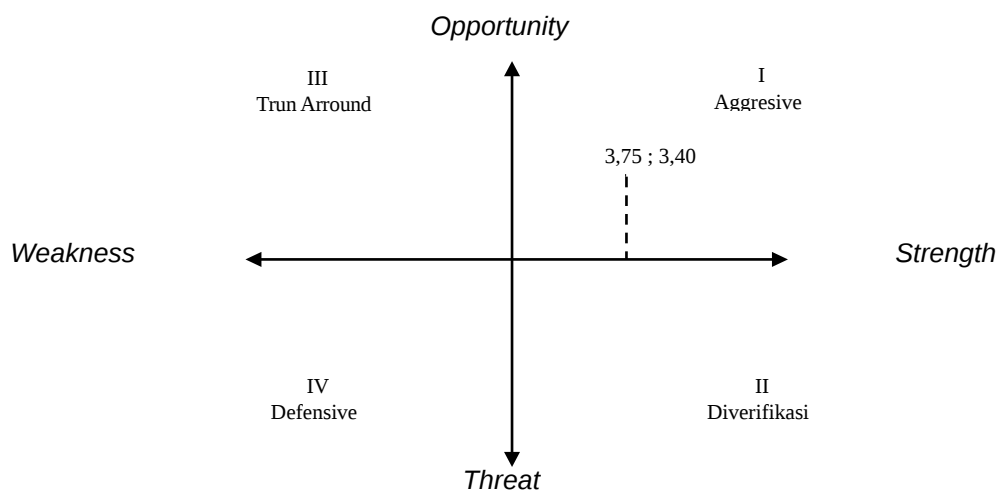
Berdasarkan tabel hasil matrik EFAS sektor UMKM & Koperasi menunjukkan score nilai sebesar 3,6, di atas nilai rata-ratanya sebesar 3,5 dari keseluruhan faktor eksternalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *opportunities* (peluang) sebesar 2,05 lebih kecil dibandingkan dengan *threats* (ancaman) sebesar 1,45 atau sebesar 0,60

Dari tabel di atas maka dapat diketahui jumlah skor Strategi SO sebesar 4,30 dengan skor Strategi ST sebesar 3,95, Nilai total ini menunjukkan bahwa kekuatan dan ancaman lebih besar pengaruhnya terhadap sektor pertambangan sedangkan pada Strategi WO sebesar 3,55 dengan Strategi WT sebesar 3,20 menunjukkan bahwa tingkat kelemahan dan peluang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman yang terjadi pada sektor UMKM & Koperasi di Kabupaten Berau.

Tabel 6.30. Tabel Matriks Internal-Eksternal Sektor UMKM & Koperasi Di Kabupaten Berau

Internal External	Kuat 4,00 – 3,00	Sedang 2,99 – 2,00	Lemah 1,99 – 1,00
Tinggi 4,00 – 3,00	I Internal = 3,75 Eksternal = 3,40	II	II
Sedang 2,99 – 2,00	IV	V	VI
Rendah 2,99 – 2,00	VII	VII	IX

Dari tabel di atas faktor internal memiliki nilai yang lebih besar sebesar 3,75 dimana yang berarti faktor tersebut seperti *strength* dan *weaknes* lebih utama dibandingkan dengan faktor eksternal, yang memiliki nilai 3,40 lebih rendah 0,35 sehingga strategi seperti *Opportunity* dan *Threat* tidak diutamakan.



Gambar 6.6. Diagram analisis SWOT Sektor UMKM & Koperasi Di Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar diagram analisis SWOT Sektor UMKM & Koperasi Kabupaten Berau menunjukkan berada pada posisi kuadran I yang berarti situasi yang sangat menguntungkan. Sektor UMKM & Koperasi Kabupaten Berau memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam posisi ini adalah mendukung pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy). Adapun UMKM & Koperasi Kabupaten Berau juga memiliki kelemahan dan ancaman, tetapi dapat memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimiliki untuk berkembang dan bertahan.

Tabel 6.31. Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS) Sektor Pariwisata Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Nilai
Strengths (kekuatan)			
Memiliki lokasi yang cukup strategis	0,15	3	0,40
Memiliki daya tarik wisata yang unggul	0,10	4	0,60
Akomodasi yang cukup lengkap	0,05	3	0,15
Terdapat atraksi pemandangan alam yang indah (alami)	0,05	4	0,60
Ketersediaan jumlah SDM cukup memadai (Ketrampilan, Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan)	0,10	3	0,30
Jumlah	0,45		2,05
Weaknesses (kelemahan)			
Masih minimnya infrastruktur yang mendukung objek wisata	0,15	4	0,60
SDM yang kurang profesional	0,15	4	0,60
Pelayanan masih belum prima	0,10	3	0,30
Kemampuan dalam mengelola Pariwisata masih terkendala modal	0,05	3	0,15
Usaha Pariwisata tidak dikelola secara Professional	0,10	3	0,30
Jumlah	0,55		1,95
Total S + W	1	3,5 (Rata-rata)	4

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Kekuatan yang besar
- 3 = Kekuatan yang kecil
- 2 = Kelemahan yang kecil
- 1 = Memiliki kelemahan yang besar

Berdasarkan tabel di atas hasil matrik IFAS sektor Pariwisata menunjukkan score nilai 4,00, di atas nilai rata-ratanya sebesar 3,5 dari keseluruhan faktor internalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *strenghts* (kekuatan) sebesar 2,05 lebih besar dibandingkan dengan *weaknesses* (Kelemahan) sebesar 1,95

Tabel 6.32. Faktor-Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Sektor Pariwisata Kabupaten Berau

Faktor-Faktor Strategi External (EFAS)	Bobot	Rating	Nilai
<i>Opportunities (peluang)</i>			
Ada dukungan dan perhatian dari pemerintah atau instansi terkait	0,15	4	0,60
Meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun nasional	0,05	3	0,30
Banyak tempat Wisata yang belum terekspos ke media lokal maupun nasional	0,10	3	0,30
Daya serap tenaga kerja tinggi	0,10	3	0,30
Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh Masyarakat	0,10	3	0,30
Jumlah	0,5		1,80
<i>Threats (ancaman)</i>			
Adanya persaingan dengan objek wisata luar Kabupaten	0,15	3	0,30
Peranan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Menjaga Objek Wisata masih kurang	0,10	3	0,30
Belum tersedianya sarana prasarana pendukung dalam meningkatkan pariwisata	0,10	3	0,30
Kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi Pariwisata	0,10	3	0,30
Partisipasi masyarakat masih rendah	0,05	3	0,15
Jumlah	0,5		1,35
Total O + T	1	3,1 (Rata-rata)	3,15

Keterangan :

Rating ditentukan sebagai berikut:

- 4 = Peluang yang besar
- 3 = Peluang yang kecil
- 2 = Ancaman yang kecil
- 1 = Ancaman yang besar

Berdasarkan tabel hasil matrik EFAS sektor Pariwisata menunjukkan score nilai sebesar 1,80 di atas nilai rata-ratanya sebesar 3,1 dari keseluruhan faktor eksternalnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai *opportunities* (peluang) sebesar 1,80 lebih besar dibandingkan dengan *threats* (ancaman) sebesar 1,35 atau sebesar 0,45

Tabel 6.33. Analisis Strategi SWOT Sektor Pariwisata Kabupaten Berau

IFAS EFAS	Strength (S) - Memiliki lokasi yang cukup strategis - Memiliki daya tarik wisata yang unggul baik di tingkat nasional maupun internasional - Akomodasi yang cukup lengkap - Terdapat atraksipemandangan alam yang indah (alami) - Ketersediaan SDM cukup memadai(Ketrampilan, Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan)	Weakness (W) - Masih minimnya infrastruktur yang mendukung objek wisata - SDM yang kurang professional - Pelayanan masih belum prima - Kemampuan dalam mengelola Pariwisata masih terkendala modal - Usaha Pariwisata tidak dikelola secara professional
Opportunities (O) - Ada dukungan dan perhatian dari pemerintah atau instansi terkait - Meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun nasional - Banyak tempat Wisata yang belum terekspose ke media lokal maupun nasional - Daya serap tenaga kerja tinggi - Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat	Strategi SO - Peningkatan Kemampuan dalam meningkatkan sektor pariwisata sehingga mempunyai peluang seiring dengan meningkatnya perekonomian - Pemasaran pariwisata perlu diperluas lagi sehingga berpeluang masuk pada semua golongan. - Riset yang berkaitan dengan pariwisata harus terus dilakukan untuk mengetahui selera wisatawan. - Sarana prasarana pariwisata pada lokasi pada satu tempat harus diimbangi dengan fasilitas dan pelayanan yang maksimal	Strategi WO - Memberikan pelatihan SDM untuk pengembangan pariwisata daerah. - Melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah daerah untuk kerjasama. - Mengikuti perkembangan pariwisata untuk mengkaji keunggulan pariwisata yang tepat. - Menggunakan kemajuan teknologi untuk menekan biaya promosi pariwisata. - Melakukan upaya mengikutkan pelatihan pengembangan dan potensi pariwisata
Threats (T) - Adanya persaingan dengan objek wisata luar Kabupaten - Peranan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Menjaga Objek Wisata masih kurang - Belum tersedianya sarana prasarana pendukung dalam meningkatkan pariwisata - Kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata - Partisipasi masyarakat masih rendah	Strategi ST - Melakukan pemilihan SDM yang mempunyai keahlian dalam bidang pariwisata. - Mengikutkan pelatihan pariwisata sesuai keperluan. - Membangun jaringan untuk menyokong pengembangan pariwisata. - Mengandeng pemerintah daerah untuk kerjasama dalam pengembangan pariwisata. - Mengusulkan pada pemerintah untuk membuat sentral industri pariwisata di tempat yang strategis.	Strategi WT - Memaksimalkan kinerja SDM untuk menghasilkan produk pariwisata yang berkualitas. - Mengkombinasikan antara Lokasi dan pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan sektor pariwisata. - Melakukan pemasaran pariwisata dengan intensif dan konsisten. - Memasarkan produk pariwisata berbasis media online.

Tabel 6.34. Rumusan Kombinasi Strategi Matrik SWOT Sektor Pariwisata Di Kabupaten Berau

	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
Kekuatan (Strength)	Strategi SO $= 2,05 + 1,80$ $= 3,85$	Strategi ST $= 2,05 + 1,35$ $= 3,40$
Kelemahan (Weakness)	Strategi WO $= 1,95 + 1,80$ $= 3,75$	Strategi WT $= 1,95 + 1,35$ $= 3,30$

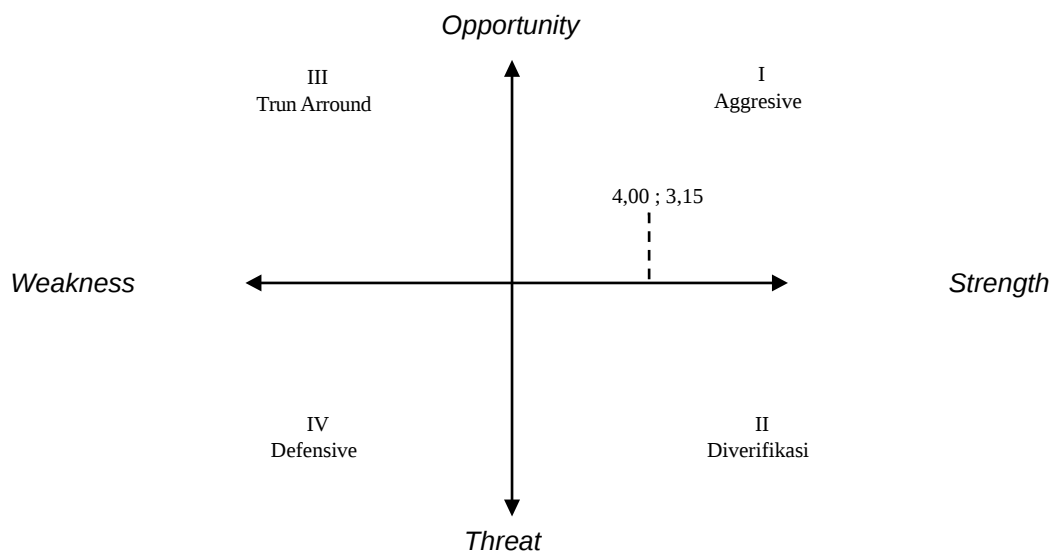
Dari tabel di atas maka dapat diketahui jumlah skor Strategi SO sebesar 4,30 dengan skor Strategi ST sebesar 3,95, Nilai total ini menunjukkan bahwa kekuatan dan ancaman lebih besar pengaruhnya

terhadap sektor pertambangan sedangkan pada Strategi WO sebesar 3,55 dengan Strategi WT sebesar 3,20 menunjukkan bahwa tingkat kelemahan dan peluang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman yang terjadi pada sektor Pariwisata di Kabupaten Berau.

Tabel 6.35. Tabel Matriks Internal-Eksternal Sektor Pariwisata Di Kabupaten Berau

Internal External	Internal		
	Kuat 4,00 – 3,00	Sedang 2,99 – 2,00	Lemah 1,99 – 1,00
Tinggi 4,00 – 3,00	I Internal = 4,00 Eksternal = 3,15	II	II
Sedang 2,99 – 2,00	IV	V	VI
Rendah 2,99 – 2,00	VII	VII	IX

Dari tabel di atas faktor internal memiliki nilai yang lebih besar sebesar 4,00 dimana yang berarti faktor tersebut seperti *strength* dan *weaknes* lebih utama dibandingkan dengan faktor eksternal, dimana faktor eksternal memiliki nilai 3,15 lebih rendah 0,85 sehingga strategi seperti *Opportunity* dan *Threat* tidak diutamakan.



Gambar 6.7. Diagram Analisis SWOT Sektor Pariwisata Di Kabupaten Berau

Berdasarkan Gambar diagram analisis SWOT Sektor Pariwisata Berau menunjukkan berada pada posisi kuadran I yang berarti situasi yang sangat menguntungkan. Sektor Pariwisata Kabupaten Berau memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam posisi ini adalah mendukung pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*). Adapun Pariwisata Kabupaten Berau juga memiliki kelemahan dan ancaman, tetapi dapat memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimiliki untuk berkembang dan bertahan.

6.2. Strategi Penanaman Modal

Strategi penanaman modal untuk meningkatkan daya saing investasi adalah dengan melakukan beberapa tahapan strategi pengembangan investasi. Berdasarkan Analisa SWOT dari masing-masing sektor diatas, maka analisa strategi penanaman modal Kabupaten Berau dapat diukur dengan skala prioritas sebagai berikut :

Tabel 6.36. Pembobotan Berdasarkan Skala Prioritas

Uraian	Bobot	Rating
• Membuka lahan untuk lini sektor penanam modal dalam peningkatan PDRB kabupaten Berau	0,10	3
• Mendatangkan investor penanam modal pada lahan strategis	0,20	4
• Memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan lahan untuk lini sektor yang tersedia	0,10	3
• Memberikan layanan birokrasi yang transparan	0,10	3
• Memberikan pelatihan SDM yang profesional	0,05	2
• Memberikan peningkatan sarana prasarana dalam pelayanan perijinan penanam modal	0,15	2
• Peningkatan pelayanan perijinan pada tatanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum	0,15	3
• Peningkatan infrastruktur dalam pelayanan pengembangan investor	0,15	3

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas setelah dirating dari faktor internal dan eksternal, maka didapat tahapan skala prioritas dalam penyusunan RUPM Kabupaten Berau sebagai berikut :

- Mendatangkan investor penanam modal pada lahan strategis.
- Peningkatan pelayanan perijinan pada tatanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum.
- Peningkatan infrastruktur dalam pelayanan pengembangan investor.
- Memberikan peningkatan sarana prasarana dalam pelayanan perijinan penanam modal.
- Membuka lahan untuk lini sektor penanam modal dalam peningkatan PDRB kabupaten Berau.
- Memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan lahan untuk lini sektor yang tersedia.
- Memberikan layanan birokrasi yang transparan.
- Memberikan pelatihan SDM yang profesional.

Dengan menggunakan matrik diagram analisis SWOT maka dapat digambarkan secara jelas mengenai ancaman dan peluang yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Berau dalam mengelolapenanam modal.



Gambar 6.8. Diagram Analisis SWOT

Strategi yang diperoleh dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut :

- Kuadran I
merupakan situasi yang sangat menguntungkan dengan mendatangkan penanam modal untuk membuka lahan lini sektor yang ada di Kabupaten Berau meningkatkan PDRB Kabupaten Berau.
- Kuadran II
merupakan situasi meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan pelayanan perijinan padatan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum. Selain itu peningkatan infrastruktur juga perlu diperhatikan dalam pengembangan penanam modal di Kabupaten Berau.
- Kuadran III
merupakan peluang besar dalam memberikan layanan birokrasi yang transparan dengan kepastian hukum terhadap pengembangan lahan di lini sektor yang tersedia.
- Kuadran IV
Pemkab Berau harus mengalokasikan pembiayaan dalam memberikan pelatihan SDM yang profesional dan memberikan sarana dan prasarana dalam pelayanan perijinan penanam modal.

BAB VII PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Peta jalan (*Road Map*) penanaman modal sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas DPMPTSP Kabupaten Berau dalam merencanakan dan mengimplementasikan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Berau. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya penanaman modal sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Kabupaten Berau.

"Mewujudkan Berau maju dan sejahtera sebagai pusat penanaman modal serta peningkatan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan"

Peta Jalan (*Roadmap*) pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Berau adalah peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi penanaman modal Kabupaten Berau dalam rangka mendukung dan mensukseskan visi Kabupaten Berau.

Mengingat bahwa penyusunan RUPM Kabupaten Berau hanya untuk jangka waktu 2023 – 2025 maka penyusunan peta jalan penanaman modal Kabupaten Berau hanya untuk 2 tahapan yaitu : Tahap/Fase I (jangka pendek) untuk tahun 2023 dan Tahap/Fase II (Jangka Menengah) untuk tahun 2024 & 2025.

7.1. Jangka Pendek : Penanaman Modal yang Cepat Menghasilkan

Penanaman modal yang relatif cepat menghasilkan implementasi pada pada Tahap/Fase I ini dimaksudkan untuk mencapai penanaman modal jangka pendek (tahun 2023) sebagai berikut :Menyediakan layanan serba cepat dan serba mudah melalui sistem informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

- 1) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang menjadi penghambat terealisasinya penanaman modal.

- 2) Memberikan fasilitas, kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif modal/biaya/pajak, pemberian fasilitas, kemudahan atau intensif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan.
- 3) Menyiapkan dasar hukum dalam rangka kepastian hukum dan konsistensi penanaman modal berupa Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Daerah terkait penanaman modal.
- 4) Menata, memodifikasi dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP.
- 5) Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah, swasta, maupun luar negeri untuk memperomosisikan daya tarik Kabupaten Berau sebagai daerah tujuan Pesebaran Investasi.
- 6) Mengidentifikasi proyek-proyek strategis ataupun potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Berau, untuk ditawarkan dan dipromosikan kepada investor baik dalam maupun luar negeri.
- 7) Hilirisasi produk pertanian untuk mendapatkan nilai tambah dan pemenuhan ketersediaan produk hilirisasi tersebut di Kabupaten Berau
- 8) Meningkatkan realisasi penanaman modal diberbagai sektor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Berau.
- 9) Mendorong peningkatan harga jual dan stabilitas harga jual komoditas sektor pertanian.
- 10) Membuka akses pasar ke kawasan regional, nasional, dan internasional
- 11) Menerbitkan peraturan perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian dari ancaman konversi untuk peruntukan yang lain.
- 12) Peningkatan investasi di sektor pertanian dan industri pengolahannya dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Berau.
- 13) Merumuskan dan mendorong tercapainya Kabupaten Berau sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara baru, yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan dan energi.

- 14) Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka penyediaan SDM unggul.
- 15) Identifikasi potensi dan pengembangan energi baru dan terbarukan yang murah dan ramah lingkungan.
- 16) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia dan peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan diberbagai sektor
- 17) Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur Kawasan Industri dan kawasan pertanian.
- 18) Memutakhirkan data UMKM yang potensial di Kabupaten Berau untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar PMDN dan PMA.
- 19) Memfasilitasi UMKM untuk pengenalan dan pemasaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dll.
- 20) Merumuskan dan implementasi pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Berau, seperti Desa wisata, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata maritim, wisata air dan wisata budaya serta lainnya.

7.2. Jangka Menengah Prioritas Penanaman Modal

Implementasi pada Tahap/Fase II (Jangka Menengah) yaitu Tahun 2024 & 2025 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Nilai Investasi PMA dan PMDN
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat
- 3) Peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan provinsi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri daerah, serta kawasan industri
- 4) Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung kebijakan energi nasional
- 5) Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi

- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melalui penguatan modal usaha masyarakat, peternak, pekebun dan nelayan/petani ikan dan pelaku ekonomi lainnya
- 7) Penyediaan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan
- 8) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Berau

BAB VIII

KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL

8.1. Kontribusi Manfaat Ekonomi

Kabupaten Berau membutuhkan banyak dana baru untuk membangun beberapa sektor penting. Dalam konteks ini, maka kontribusi manfaat ekonomi pada pembangunan,:

- 1). Investasi dapat membantu untuk pembangunan dapat segera dilakukan.
- 2). Membuka lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya banyak mengurangi angka pengangguran. Penduduk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan tingkat perekonomian mereka bisa meningkat perlahan-lahan.
- 3). Investor membawa teknologi dan pengetahuan dari Negara asal. Contohnya teknologi pengolahan air minum di suatu kota atau teknologi seluler yang cepat dan hemat data. Hal-hal seperti ini belum tentu dimiliki oleh Indonesia sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pemodal asing.
- 4). Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 5). Pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa dan pajak-pajak yang dibayarkan.

Uraian di atas, pada prinsipnya dapat ditingkatkan dengan kehadiran investasi dalam dan luar negeri karena kegiatan investasi melalui kehadiran investasi baik dalam maupun luar negeri atau asing memberikan sejumlah manfaat bagi daerah. Manfaat secara langsung diperoleh dari pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa dan pajak-pajak yang dibayarkan kepada negara dan daerah.

Dengan demikian kedepan rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Berau dan rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD serta produk domestik regional bruto Kabupaten Berau diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik lagi, tetapi dengan catatan investasi tersebut tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup.

8.2. Kontribusi Manfaat Sosial

Kehadiran para investor di dalam maupun di luar negeri dapat berdampak positif atau negatif terhadap sosial kemasyarakatan. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan dari adanya penanaman modal oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional ini merupakan akibat dari investasi yang padat karya dan padat modal yang berkembang dengan baik, misalnya dengan dibangunnya sarana dan prasarana di daerah tersebut seperti proyek pembangkit listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya. Maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek. Dengan demikian kontribusi penanaman modal antara lain adalah membuka lapangan kerja, apalagi apabila PMA mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Berau karena apabila kegiatan usaha perusahaan asing telah dipercayakan pada masyarakat Kabupaten Berau, maka semakin banyak kesempatan kerja, semakin banyak pula tenaga kerja yang tertampung. Hal ini dapat mengurangi pengangguran. Mengingat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau relatif masih rendah.

Kontribusi lainya dari PMA/PMDN terhadap sosial dan budaya adalah meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bekerja di perusahaan asing, maka tingkat penguasaan tenaga kerja di Kabupaten Berau dapat bertambah karena terbiasa menggunakan peralatan modern sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern. Hal tersebut berarti kehadiran investasi adalah percepatan pengembangan sumber daya manusia melalui transfer keahlian memenuhi salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan manusia adalah kemajuan dibidang pendidikan. Disamping itu, kehadiran investasi, dapat membuka kemungkinan perusahaan yang berinvestasi dapat memberikan bantuan pendidikan melalui program CSR sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Bantuan CSR tersebut, penting mengingat Kabupaten Berau kedepan membutuhkan dana untuk merevisi atau membangun sekolah yang rusak berat dengan kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur

rusak, maupun yang rusak sedang dengan kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri. Selanjutnya dari kontribusi penanaman modal adalah terpenuhinya kebutuhan karena adanya PMA/PMDN, berarti makin banyak tersedia alat pemuas kebutuhan bagi masyarakat dan masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan PMA, yaitu memperoleh konsumen sebanyak mungkin. Para pengusaha asing akan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat Kabupaten Berau

Pengusaha dalam negeri akan lebih bersemangat untuk meningkatkan mutu dari hasil produksinya. Tujuannya agar mereka tidak kalah bersaing dengan pengusaha asing. Manfaat kehadiran investor yang positif berikutnya adalah berkembangnya pembangunan infrastruktur ekonomi, dan bermunculan berbagai kegiatan ekonomi (multiflier effect). Namun demikian kegiatan investasi dapat pula mengakibatkan sejumlah dampak negatif, misalnya semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadinya perbedaan tingkat upah antar golongan pekerja, mendorong pola konsumsi mewah, karena itu diperlukan keseimbangan pengaturan.

8.3. Kontribusi Manfaat Lingkungan

Kontribusi untuk kemanfaatan lingkungan yang diperoleh dari investasi yang memperhatikan lingkungan hidup adalah setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Berau meliputi:

1. Terkendalinya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan.

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. Karena tidak ada ketentuan tentang kedua hal tersebut, maka tata ruang kita dengan mudah berubah. Tidak mengherankan jika kemudian tata ruang kita disetir oleh kekuatan modal (market driven) dan bukan oleh perangkat perencanaan.

Agar tidak melampaui daya tampung dan daya dukung, maka usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh investor maupun oleh Pemerintah

Kabupaten Berau wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan kebijakan, rencana dan program. Pada tataran program, aspek lingkungan diintegrasikan sejak mulai tahapan pemilihan alternatif kegiatan. KLHS pada tataran program mempersyaratkan bahwa pada setiap alternatif proyek tersebut dikaji implikasi lingkungannya. Masuknya aspek lingkungan pada tahapan program akan menjamin bahwa alternatif proyek yang dipilih bukan saja layak secara ekonomi dan teknologi tetapi juga telah berwawasan lingkungan.

Pada tataran perencanaan, KLHS diintegrasikan pada penyusunan tata ruang. Telah banyak diketahui bahwa rencana penataan ruang selama ini lebih berorientasi pada fisik dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah ruang yang dialokasikan untuk sebuah peruntukan, tidak ada ketentuan seberapa banyak ruang tersebut mampu menampung kegiatan. Juga tidak ada ketentuan kegiatan macam apa yang boleh menghuni di ruang tersebut. Dengan kata lain, sebuah ruang tidak dilengkapi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Izin lingkungan dan KLHS tidak memberikan ruang gerak pada kegiatan dan/atau usaha. Izin lingkungan akan memperpanjang tahapan perizinan. Pada masa yang lalu, ketika sudah mendapat surat rekomendasi kelayakan lingkungan segera dapat memulai kegiatan. Tetapi pada saat ini harus dilengkapi dengan satu tahapan lagi untuk mendapatkan izin lingkungan. Dengan KLHS, dunia usaha harus menyesuaikan spesifikasi proyeknya dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung sebuah ruang, dan tidak menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

KLHS berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tata ruang nasional, provinsi, kota dan kabupaten harus mendasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 selambat-lambatnya pada tahun 2010.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Berau harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, dan

dunia usaha tidak perlu memandang ketentuan lingkungan sebagai beban, karena ketika kondisi lingkungan makin buruk, maka beban biaya tinggi yang harus ditanggung oleh penanggung jawab atau pelaku usaha dan/atau kegiatan.

2. Mengembangkan Instrumen Lingkungan Dihubungkan Dengan Nilai Lingkungan

Banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, salah satu diantaranya adalah tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Subyek ini merupakan sesuatu yang baru, pada Undang-Undang Nomor sebelumnya subyek ini belum diatur. Lingkup instrumen ekonomi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, instrumen ekonomi lingkungan hidup terdiri dari:

Pertama, Instrumen perencanaan pembangunan & kegiatan ekonomi meliputi:

- 1) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 2) Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah.
- 4) Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Kedua, instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:

- 1) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.
- 2) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.
- 3) Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Terkait dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, pemegang izin lingkungan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah:

- 1) Emas untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; dan
- 2) Hijau untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.
- 3) Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a) Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup.
 - b) Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup.
 - c) Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup.
 - d) Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi.
 - e) Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.
 - f) Pengembangan asuransi lingkungan hidup.
 - g) Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup.
 - h) Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX PELAKSANAAN

Penyusunan RUPM Kabupaten Berau ini dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM, khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan Pemerintah mengatur perlunya (mewajibkan) Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam penyusunan RUPM Kabupaten Berau ini selain memperhatikan arahan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Harapannya RUPM yang disusun bisa menjadi acuan DPMPTSP Kabupaten Berau dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Berau.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota bahwa penetapan RUPM Kabupaten oleh Bupati maka penetapan RUPM Kabupaten Berau ini nantinya dilakukan oleh Bupati Berau melalui Peraturan Bupati Berau.

Terhadap arah dan kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, RUPM Kabupaten Berau ini memerlukan suatu langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan. Adapun langkah-langkah konkrit tersebut sebagai berikut:

- 1) RUPM ini harus menjadi acuan (*rule of law*) dan kerangka kerja (*frame work*) setiap pemangku wewenang dalam pengambilan kebijakan penanaman modal di wilayah Pemerintah Kabupaten Berau.

- 2) Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan kegiatan penanaman modal sesuai cakupan kewenangannya dengan mengacu kepada RUPM ini.
- 3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam RUPM ini sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis melalui Surat Edaran Kepala DPMPTSP Kabupaten Berau.
- 4) Dalam implementasi RUPM, Pemerintah Kabupaten Berau dapat berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

BAB X

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Rencana fasilitasi proyek penanaman modal yang strategis dan cepat tumbuh Kabupaten Berau disajikan pada Tabel 10.1.

Tabel 10.1. Rencana Fasilitasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Berau

No	Nama Proyek	Kondisi Saat ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
1	Jenis Proyek : Pembangunan dan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kelay Lokasi : Kampung Long Beliu, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Status : PMDN/PMA Nilai Investasi : - Bidang Usaha : Energi Terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Produksi : +/- 55 MW Lahan : 1°43'50.7" N & 117°04'54,5" E Tenaga Kerja : - Rencana Produksi : 55 MW Komersial	Dalam proses penyusunan <i>Feasibility Study</i> (FS)	Tidak ada permasalahan pokok	Tidak ada langkah pemecahan masalah karena tidak ada permasalahan pokok dalam rencana investasi ini

LAMPIRAN

DAFTAR TIM
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023-2025

Pekerjaan
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

Penanggung Jawab I	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P.
Penanggung Jawab II	: Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Ketua Tim	: H. M. Tommy Fimi Putra, SE, M.Si. (Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan)
Anggota Tim	: 1. Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P. (Ahli Pertanian) 2. Ine Ventyrina, S.H., M.H. (Ahli Hukum) 3. Fareis Althalets, S.Par., M.M.Par. (Ahli Pariwisata)
Asisten Ahli	: 1. Grasia Wieke Tanyasari, SE, M.Sc. (Asisten Ahli Ekonomi) 2. Ria Rahayu, S.H. (Asisten Ahli Hukum)
Tenaga Administrasi dan Operator Komputer	: Hj. Megalia Pratiwi, S.E.
Enumerator	: 1. Hj. Megalia Pratiwi, S.E. 2. Nisrina Indah Permata Sari.